

**IMPLEMENTASI NILAI “PANRANNUANGKU” DALAM PENYUSUNAN
ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI *EXPECTANCY THEORY***

(Study pada Kantor Desa Cakura Kab.Takalar)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RAFITA

10800113076

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafita
NIM : 10800113076
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar/12 Juni 1995
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Kelurahan Bulukkunyi, Kec. Pol-Sel, Kab. Takalar
Judul : Implementasi Nilai “*Panrannuangku*” dalam
Penyusunan Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari
Expectancy Theory (Studi pada Kantor Desa Cakura,
Kab. Takalar)

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, November 2017
Penyusun,

RAFITA
NIM: 10800113076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi Nilai *Panrannuangku* dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari *Expectancy Theory* (Studi pada Kantor Desa Cakura, Kab. Takalar)”, yang disusun oleh **RAFITA**, NIM: 10800113076, Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan diportahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan 09 Rabiul Awal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 28 November 2017

09 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Penguji I : Memen Suwandi, SE., M.Si.

Penguji II : Ismawati, SE., M.Si.

Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si.

Pembimbing II : Dr. Syaharuddin, SE., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, Rahmat dan Inayahnya, serta kecerdasan ilmu pengetahuan yang dilimpahkan oleh-Nya sehingga atas Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad” selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Nilai Panrannuangku dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Expectancy Theory (Studi pada Kantor Desa Cakura Kab. Takalar)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukan hal yang mudah, banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Dan juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril, materil, dan spiritulan dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan cinta yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Safri Dg. Sajang dan Ibunda Karannuang Dg. Rannu yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung, memotivasi

dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT demi keberhasilan penulis. Kepada Muh. Syahrul yang lahir dari rahim yang sama dan selalu mendukung, memotivasi dan menjadi alasan penulis untuk berusaha menjadi teladan, serta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat untuk melakukan yang terbaik.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Syaharuddin M.Si., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Andi Wawo, S.E., M.Si selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihatnya.
5. Segenap dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Bapak DR. H. Burhanuddin Baharuddin. SE., Ak., M,Si selaku Bupati Takalar dan Nurdiansyah S,Pd. selaku Kepala Desa Cakura yang telah memberi ruang kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Teman-teman Akuntansi UIN Alauddin Makassar, AK- B (3,4) yang selalu memberi bantuan, semangat serta menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.
8. Teruntuk Syaiful, Arsan, Yusrifal, Ridwan S, Abdi, Hermawan, Syafridayani, Ummul, Riska, Fitri A, Putri, Wika R, Wahyuni Rathuloly serta yang tidak penulis sebutkan satu persatu namun senantiasa memberi tumpangan dan bantuan untuk penulis pada masa pengurusan tahap akhir perkuliahan.
9. Terkhusus Riza A'yuni, Nurfajriani P, Raden Roro, dan Kartika S, sahabat dan Kak Aeny yang selalu ada untuk penulis.
10. Bapak tukang bentor dan pengemudi Grab yang telah menyediakan jasanya dan membantu penulis tiba di kampus tepat waktu.
11. Kepada seluruh keluarga besar UKM SENI BUDAYA eSA, Terkhusus Eksibanat 17, kanda Fadel M dan Sarsil M yang telah merangkul penulis menggalang bakat, berorganisasi, berlembaga dan berkesenian di UIN.
12. Teman KKN UIN Angkatan 54, "*Kampung Keramat*" Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Selayar, Anti, Dinda, Sari, Wahyu, Aan Budi H, dan Ansar. Serta teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Penulis,

RAFITA

NIM. 10800113076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Manfaat Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Expectancy Theory</i>	16
B. <i>Stewardship Theory</i>	19
C. Falsafah “ <i>Panrannuangku</i> ”	22
D. Alokasi Dana Desa	28
E. Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa	35
F. Nilai Kearifan “ <i>Panrannuangku</i> ” di Desa Cakura ditinjau dari <i>Expectancy Theory</i>	42
G. Penempatan Unsur-unsur pokok Kearifan “ <i>Panrannuangku</i> ” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura	44
G. Rerangka Pikir	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Instrumen Penelitian	54
F. Teknik Analisis Data	55
G. Pengujian Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Kondisi Geografis.....	57
2. Kondisi Demografis.....	58
3. Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa	62
4. Susunan keanggotaan BPD Desa Cakura	63
B. Hasil dan Pembahasan.....	64
1. Hasil Penelitian.....	64
a. Nilai <i>Panrannuangku</i> di Desa Cakura ditinjau dari <i>Expectancy Theory</i>	64
b. Penempatan unsur-unsur pokok Kearifan “ <i>Panrannuangku</i> ” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura	67
2. Pembahasan	77
a. Nilai <i>Panrannuangku</i> di Desa Cakura Ditinjau dari <i>Expectancy theory</i>	77
b. Penempatan Unsur-unsur pokok Kearifan “ <i>Panrannuangku</i> ” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
1. Nilai <i>Panrannuangku</i> di Desa Cakura ditinjau dari	

<i>Expectancy Theory</i>	105
2. Penempatan Unsur-unsur pokok Kearifan	
“ <i>Panrannuangku</i> ” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa	
di Desa Cakura	106
B. Implikasi	106
C. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Sektor Matapencaharian Desa Cakura	58
Tabel 4.2 Pengusaan Aset Ekonomi Desa Cakura	59
Tabel 4.3 Alokasi APBDes Cakura	82
Tabel 4.4 Rincian Alokasi APBDes Cakura	82
Tabel 4.5 Rencana Anggaran Dana Desa Cakura Tahap I 60%	85
Tabel 4.6 Rencana Anggaran Dana Desa Cakura Tahap II 40%.....	87
Tabel 4.7 Rencana Alokasi Dana Desa Cakura.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa	45
Gambar 2.2 Rerangka Pikir	49
Gambar 4.1 Peta Desa Cakura.....	57
Gambar 4.2 Diagram Fasilitas Kesehatan Desa Cakura	60
Gambar 4.3 Diagram Fasilitas Pendidikan Desa Cakura	61
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa Cakura	62
Gambar 4.5 Struktur Keanggotaan BPD Desa Cakura	63
Gambar 4.6 Nilai Falsafah Panrannuangku di Desa Cakura Ditinjau dari Expectancy Theory.	79



ABSTRAK

Nama : Rafita
Nim : 10800113076
Judul : Implementasi Nilai “Panrannuangku” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari *Expectancy Theory* (Study pada Kantor Desa Cakura Kab.Takalar)

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui nilai *panrannuangku* ditinjau dari *expectancy theory* dan untuk mengetahui penempatan unsur-unsur pokok kearifan *panrannuangku* dalam penyusunan alokasi dana desa di Desa Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atas perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami sudut pandang penduduk asli terkait penyusunan alokasi dana desa. Melakukan penyandingan unsur budaya atau kearifan lokal *panrannuangku* dalam penyusunan alokasi dana desa menggunakan paradigma kritis agar bisa memahami karakteristik komunitas ini lebih komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang *expectancy theory* yang menjadikan kekuatan motivasi dalam kinerja tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil kinerja tersebut beriringan dengan nilai *panrannuangku*. Pada nilai falsafah *panrannuangku* yang berarti harapan, didalamnya terkandung harapan masyarakat yang menjadi dorongan kinerja aparat pemerintah desa untuk memperoleh hasil kinerja yaitu harapan aparat itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur pokok kearifan *panrannuangku* yang diantaranya *tau nirannuang*, *tau anrannuang*, *appakarannu-rannu*, *assamaturu*, *pappasang*, dan *kacaraddekang* pada umumnya berada pada tiga garis besar mekanisme dalam penyusunan alokasi dana desa. Tiga mekanisme tersebut yaitu pra-musyawarah, musyawarah (penyusunan), dan pengambilan keputusan. Maka kesadaran akan penerapan unsur-unsur pokok kearifan lokal ini mampu mendorong aparat lebih tepatguna dan berjalan lurus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait penyusunan alokasi dana desa.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Dana Desa, *Panrannuangku*, *Expectancy Theory*, Harapan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan aset-asetnya. Terdiri dari beberapa pulau atas perkotaan yang padat dan ribuan pedesaan. Dalam desa-desa tersebut, seribu keragaman budaya Indonesia tertanam dan melahirkan berbagai keluhuran dan kearifan lokal yang memikat mata dunia. Merupakan tunas Bangsa Indonesia maka desa-desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka terlahirlah beberapa kebijakan pemerintah untuk membangun desa. Kila (2017) menyatakan bahwa melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan Chomariyah, dkk (2016) bahwa desa-desa memiliki hak untuk asal-usul mereka dan hak-hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya. Maka pilihan model kebijakan ADD dalam perspektif konvensional kebijakan publik merupakan upaya mereplikasi kebijakan manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam pelayanan publik.

Annivelorita (2015) dan Darmiasih, dkk (2015) menyatakan bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju tercapainya otonomi

desa, perlu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu, maka akan tercipta pergerakan yang pertikular, meski pergerakan yang dilakukan selama ini belum efisien. Saputra (2016) menyatakan bahwa alokasi dana desa yang digunakan pemerintah setempat telah mencapai kriteria efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensinya karena pencairan alokasi dana desa mengalami hambatan. Salah satu titik vital hambatan alokasi dana desa seperti yang dinyatakan oleh Saputra tersebut dapat dipengaruhi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang terlalu mengungkung ego.

Tahun ke tahun, dana desa yang disalurkan semakin meningkat. Namun, dari tahun ke tahun pula selalu tercium tindak penyelewengan dana desa. Melihat kasus yang terjadi maka harus dilakukan pengawasan yang tetap dan memerlukan langkah kreatif dalam mengatasi masalah tersebut. Selain tindak penyelewengan, kecenderungan tidak efisiensi ADD didasari oleh pemborosan dalam memperhitungkan alokasi keuangan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa, tidak cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal (Yunianti, 2015). Tindakan demikian merupakan faktor etika dalam diri eksekutor yang mengarah kepada tindak korupsi oleh aparat. Rahman (2011) menyatakan bahwa tindak korupsi kecil yang berdampak besar merupakan salah satu kerusakan mental yang menjadi penghambat serius bagi tingkat efisiensi dana desa meski sangat jelas dalam islam

bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang dan diharamkan oleh Allah SWT seperti yang terkandung QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa/4:29).”

Jelas bahwa dalam Ayat di atas, Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Oleh karena itu, maka perlu adanya perbaikan mental bagi para aparat pemerintah dalam mengalokasikan dana desa.

Beranjak dari tahun 2014 pada hasil temuan dan investigasi LSM LPK-2 Sulawesi Selatan yang mengindikasi lemahnya sistem pengawasan instansi terkait sehingga membuka ruang dan celah bagi kepala desa nakal untuk memainkan dan ADD yang dikelolanya. Nampak 11 desa yang menjadi fokus pemantauan, diantaranya 10 desa diduga kuat melakukan tindak penggunaan ADD secara piktif (Ampa, 2014). Tidak berselang waktu yang cukup lama, kembali ditemukan tindak penyelewengan. Tahun 2016 justru sangat ironis karena dana ratusan juta yang dikucurkan pemerintah pusat melalui program dana desa tidak digunakan sesuai aturan pemdes, transparansi penggunaan anggaran tidak diperlihatkan oleh Kades

setiap ada pertemuan (Ronalyw, 2016). Tidak jera dengan kasus-kasus sebelumnya, tahun 2017 ini masih tercium tindak penyelewengan dana, maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik seharusnya berpondasi yang kuat, sebab kerusakan mental seorang pemimpin akan merusak bumi dan seisinya, seperti yang terkandung dalam ayat Q.S. Ar Ruum/30:41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ” (Q.S. Ar Ruum/30:41).

Ayat di atas, Allah *Ta'ala* menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat dilakukan tangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat manusia adalah inti “kerusakan” sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi.

Beberapa kasus dan langkah yang dilakukan untuk menekan tindak kecurangan ataupun tindak nonakuntabilitas pihak pemerintah hanya pada sektor penggunaan anggaran dan program alokasi dana desa semata (fisik), tidak melirik bagian dasar pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan bagian penyusunan, dasar yang kuat untuk menekan terjadinya hal tersebut. Sisoumang, dkk (2013) mengemukakan bahwa untuk pembangunan desa, penting untuk memperluas

pengembangan kapasitas dengan meningkatkan pengetahuan dasar, pengembangan etika dan tata pemerintahan yang baik diantara anggota dan komite penasehat. Hal tersebut sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas pelaksanaan dana desa dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (Laonet, dkk. 2013). Oleh karena itu perlu akuntabilitas nonfisik dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Melihat pengelolaan dana desa yang masih jauh dari efisiensi, maka Pemerintah Desa digugat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel (Chomariyah, dkk. 2016). Oleh karena itu, Randa dan Fransiskus (2014) menyatakan ada dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program) dan keluaran (aktivitas oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah sehingga pengelolaan alokasi dana desa berjalan sesuai tujuan.

Terkait misi efisiensinya pengelolaan dana desa, Prabawa (2015) dan Asni, dkk (2013) menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan aparatur desa merupakan pondasi pelaksanaan kegiatan pemerintah khususnya di bidang keuangan dalam mengelola dananya. Akan tetapi Mongsawad (2010) menyatakan bahwa, kecukupan ekonomi merupakan filosofi tepat untuk menekan, jalan tengah sebagai prinsip utama untuk perilaku yang sesuai dengan tingkatan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan unsur budaya dalam pemerintahan patut dijadikan pondasi kegiatan pemerintahan untuk mencakup beberapa unsur kesatuan.

Terkait beberapa kasus yang terjadi, seiring pengelolaan dana desa, maka falsafah “*Panrannuangku*” dapat dijadikan landasan kreatif untuk menciptakan kematangan efisiensi dana desa, terutama di Kantor Desa Cakura, Kabupaten Takalar yang merupakan desa yang tergolong cukup tua dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sebab masyarakat menaruh sebuah harapan kepada para aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Venus, 2003). Desa Cakura merupakan pemekaran dari Kelurahan Bulukkunyi dua periode terakhir berada ditangan seorang kepala desa yang diakui handal oleh masyarakatnya dalam menata desa. Pada tahun 2017, kekuasaan tersebut berpindah tangan secara demokrasi pada salah satu tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, sistem-sistem dalam pembangunan masyarakat Desa Cakura memiliki perbedaan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi dana desa maupun dana desa tentu perlu pondasi untuk mengikuti jejak dua periode pemerintahan sebelumnya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pemahaman tantangan dan kesempatan perlu revitalisasi dengan budaya dan falsafah yang dikenal. Oleh sebab itu maka falsafah budaya setempat memiliki peranan penting dalam pembangunan daerahnya.

Mustari (2012) menyatakan bahwa falsafah “*Panrannuangku*” merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari “*Siri’ na Pacce*”. Kandungan didalamnya dapat menjadi salah satu unsur yang menunjang tindakan aparat dalam penyusunan alokasi dana desa. Seputar falsafah *Panrannuangku*, beberapa faktor seyogianya mampu memberikan kontribusi mengingat bahwa *Panrannuangku* yang

berarti harapan tersebut mencerminkan harapan masyarakat yang akan merujuk pada pola komunikasi menuju kepada satu tujuan yang sama.

Melihat realitas sekarang ini baik sektor publik maupun sektor privat pertanggungjawaban fisik lebih ditekankan sehingga tidak fiktif kerap terjadi. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah kajian penyusunan alokasi dana desa yang disentuh dengan unsur-unsur kebudayaan leluhur dengan peninjauan dari kacamata *Expectancy Theory* yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom (1964). *Expectancy Theory* tersebut yang kemudian menjadi teori yang membantu pengaplikasian falsafah *Panrannuangku*. Selain, itu teori *Stewardship* oleh Donaldson dan Davis (1989-1991) juga mendukung sasaran hasil utama yaitu kepentingan organisasi dengan peran internal *Steward*. Seperti yang dinyatakan oleh Putri, dkk (2013) bahwa teori tersebut memberikan dorongan bagi karyawan menuju tujuan organisasi. Melalui beberapa unsur-unsur yang tertanam dalam teori ini, mampu menjadi sebuah landasan mengimplementasikan rujukan nilai kearifan dan beriringan dalam menekan sikap aparat melakukan penyusunan alokasi dana desa.

Rusdi dan Susanti (2015) menyatakan bahwa dengan memaknai dan menanamkan nilai-nilai budaya *Siri' na Pacce* akan membuat diri menjadi lebih bermanfaat terutama dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun sosial. Selain sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, nilai budaya *Siri' na Pacce* juga merupakan alat untuk mengontrol sikap dan perilaku setiap individu, membentuk tatanan masyarakat yang lebih bermoral dan beretika. Sehingga, diharapkan nilai-nilai yang ada pada budaya *siri' na pacce* harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Oleh sebab itu, kandungan falsafah di dalamnya yang tidak terpisahkan dari “*Siri’ na Pacce*” dapat menjadi salah satu unsur yang menekan tindakan aparaturnya yang sesuai harapan dalam penyusunan alokasi dana desa.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penelitian ini bermaksud mengetahui nilai kearifan “*panrannuangku*” sebagai pondasi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cakura untuk mencapai keefesienan dibawah kepemimpinan yang baru. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Implementasi Nilai *Panrannuangku* dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari *Expectancy Theory* (Studi Pada Kantor Desa Cakura Kabupaten Takalar)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus

Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura berdasarkan *Expectancy Theory* yang juga mengarah kepada nilai harapan untuk pencapaian sebuah hasil kinerja. Selain itu, penelitian ini juga mengarah pada bagaimana nilai-nilai dalam kearifan lokal “*Panrannuangku*” memberikan sumbangsih sebagai pondasi dalam penyusunan alokasi dana desa menuju keefisienan pengelolaan dana desa. Melihat bahwa saat ini, pembangunan desa dengan pengelolaan kebijakan dana desa menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu langkah kreatif non-fisik yang bisa menunjang keefisienan pengelolaan kebijakan tersebut.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Desa Cakura yang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Takalar. Desa Cakura merupakan pemekaran dari Desa Bulukkunyi yang saat ini telah menjadi Kelurahan Bulukkunyi. Dipilihnya objek

penelitian ini dengan alasan bahwa Desa Cakura beberapa periode terakhir berada di tangan seorang pemimpin yang terkenal dan diakui handal dalam menata desanya, akan tetapi dua periode tersebut berakhir pada tahun ini. Maka tahun 2017 ini, kekuasaan tersebut berpindah secara demokrasi ke tangan seorang pemimpin. Hal tersebut berarti bahwa sistem yang dilakukan dalam pembangunan dan pengelolaan setiap kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah juga berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya. Sementara pembangunan desa dan pengelolaan kebijakan ADD menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang muncul dari perumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura ditinjau dari *Expectancy Theory*?
2. Bagaimana penempatan unsur-unsur pokok kearifan “*Panrannuangku*” dalam penyusunan alokasi dana desa di Desa Cakura?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui nilai kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura ditinjau dari *Expectancy Theory*.
2. Mengetahui penempatan unsur-unsur pokok kearifan “*Panrannuangku*” dalam penyusunan alokasi dana desa di Desa Cakura.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat bagaimana kearifan lokal daerah Takalar yaitu “*Panrannuangku*” di Desa Cakura dalam penyusunan alokasi dana desa berdasarkan *Expectancy Theory*. Memasuki area mekanisme pengelolaan dana desa sebelum dialokasikan ke dalam program dan menjadi pondasi bagi sistem pemerintahan yang baru ialah demi menciptakan efisiensi terhadap kebijakan alokasi dana desa, menekan dan mencegah terjadinya pertanggungjawaban piktif aparat desa yang merajalela. Penelitian terdahulu mengenai Alokasi Dana Desa, beberapa penelitian terkait kebudayaan dan penelitian yang menggunakan metode tertentu untuk efisiensi pengelolaan dana desa akan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu berikut ini :

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kila (2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Secara umum pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Proses perencanaannya tidak melibatkan masyarakat dan tidak melalui forum musyawarah desa, juga proses pelaksanaan anggaran dan kegiatannya tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

2.	Chomariyah, dkk (2016)	Participation Principle on the 2014 Village Law in Coastal Village	<p>Melalui pendekatan hukum, Desa Pangkah Kulon menetapkan prioritas pembangunan pada pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas hidup, serta pengurangan kemiskinan. Pemerintah Desa digugat transparan dan akuntabel.</p> <p>BMD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan melakukan peran yang serius, dalam hal penggunaan anggaran. Prinsip partisipasi dapat mendorong aparat desa Pangkah Kulon transparan dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa. Serta mendirikan aplikasi digital untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.</p>
3.	Rusdi dan Susanti (2015)	Nilai Budaya Siri' Na Pacce dan Perilaku Korupsi	<p>Nilai budaya siri'na pacce memiliki timbal balik dengan perilaku korupsi. Semakin besar nilai budaya siri'na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan.</p> <p>Sebaliknya, semakin kecil nilai budaya siri'na pacce yang dianut maka semakin besar perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Hasil penelitiann juga membuktikan bahwa nilai budaya siri'na pacce dapat menjadi salah satu faktor yang menekan perilaku korupsi. Sehingga, diharapkan dengan menanamkan nilai budaya siri'na pacce, perilaku korupsi</p>

			dapat dicegah dan ditekan.
4.	Randa dan Fransiskus, (2014)	Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.	Ada dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan, yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan akuntabilitas keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas kombongan (duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah).
5.	Laonet, dkk (2013)	Strategies for Capacity Building in Implementing the Village Fund	<p>Hasil penelitian dari 72 anggota dana desa menunjukkan bahwa prestasi pengetahuan, sikap dan keterampilan praktis memiliki nilai yang berbeda rata-rata 6,79 pada data statistik tingkat 0,001. Strategi peningkatan kapasitas dalam melaksanakan dana desa untuk komite dana dan anggota adalah perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Perlu pelatihan untuk tahu dengan mendukung pengetahuan dasar masuk ke masyarakat lembaga moneter, administrasi sistemik dalam pengelolaan dana komite, manajemen anggota diri dan akuntansi rumah tangga, dan menggunakan ekonomi swasembada.</p> <p>Selain itu, perlu pelatihan akuntansi manajemen, keterampilan akun pendapatan-biaya dana desa, dan penerapan</p>

			<p>aplikasi komputer untuk rekening dana desa. Namun, mereka harus menggunakan filsafat Kecukupan Ekonomi sebagai pedoman dasar dalam hidup dengan pelaksanaan administrasi panitia dana dengan integrasi sistem administrasi, manajemen akuntansi, dan penggunaan komputer keaksaraan untuk menjaga keaksaraan.</p>
6.	Sisoumang, dkk (2013)	<p>Operation and Management of the Village Development Fund in Champasak Province, Lao PDR</p>	<p>Dana Pembangunan Desa diperluas secara bertahap selama. Manajemen pada umumnya memuaskan namun, masalah etika dan tata kelola personil manajemen yang kurang baik. Makanya butuh keterampilan manajemen dan pengalaman, juga pengetahuan dan pemahaman para anggota menerima fleksibel.</p> <p>Untuk mempertahankan Dana Pembangunan Desa, penting untuk memperluas pengembangan kapasitas dengan meningkatkan pengetahuan dasar tentang prinsip dan konsep-diantara anggota, pengembangan etika dan tata pemerintahan yang baik diantara anggota manajemen dan komite penasehat. Kegiatan pembangunan desa ini membutuhkan lebih banyak dukungan dari sektor publik untuk menjamin efisiensi dan keberlangsungan.</p>

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literatur yang bermanfaat, baik dari aspek teoretis maupun praktis seperti berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini terfokus pada implementasi sebuah falsafah dari Kabupaten Takalar, yaitu "*Panrannuangku*". Kemudian ditinjau dengan menggunakan teori harapan atau *Expectancy Theory*. Teori yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom (1964) ini kemudian dikembangkan oleh Porter-Lowler (1968). Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi sebuah pengembangan bagi teori harapan atau *Expectancy Theory* tersebut dengan adanya unsur falsafah di dalamnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga mengembangkan teori *stewardship* dalam penerapannya yang mengarah kepada perilaku eksekutor yang lebih mementingkan tujuan organisasi dengan mengesampingkan tujuan pribadi.

Diharapkan pula penelitian ini mampu menjadi pegangan bagi pengembangan teori-teori dalam menyikapi alokasi dana desa. Melalui unsur Falsafah "*Panrannuangku*" ditinjau dengan teori harapan atau *Expectancy Theory* maka diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih yang lebih kreatif dalam pengembangan teori penyelenggaraan alokasi dana desa dengan teori Stewardship sebagai teori pendukung, sehingga menjadi sebuah referensi maupun rujukan terhadap penelitian dan pengembangan studi pada bidang sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah daerah terkhusus bagi Daerah Kabupaten Takalar untuk bertindak sesuai aspirasi masyarakat. Sesuai Falsafah "*Panrannuangku*" yang dipegang teguh oleh para leluhur, diharapkan bahwa pihak pemerintah menyadari pentingnya penerapan nilai-

nilai leluhur tersebut sebagai pondasi dalam segala aspek kegiatan pemerintah. Menjadi pondasi para aparat desa dalam melakukan penyusunan alokasi dana desa. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa menemukan titik efisiensi yang tepatguna, berjalan lurus dan berujung pada misi yang sesungguhnya. Pada tingkat keberhasilan penelitian ini, diharapkan bahwa penerapan Falsafah “*Panrannuangku*” menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat-aparat pemerintah dalam melakukan tugasnya.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Expectancy Theory*

Ainy (2013) dan Lunenburg (2011), menyatakan bahwa *Expectancy Theory* dikemukakan atau dicetuskan pertama kali oleh Victor H. Vroom (1964), yang kemudian dikembangkan oleh Porter-Lowler (1968). Victor H. Vroom dikenal dengan teori model vroom yang terdiri atas teori ekspektasi, teori instrumentalis, dan teori valensi (Roen, 2012). Selain itu Roen juga menyatakan bahwa teori harapan ini lebih menekankan kepada hasil (*Out Comes*) dibanding dengan kebutuhan (*Needs*). Teori ini menyatakan bahwa intensitas kecenderungan melakukan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan daya tarik dari hasil kepada individu.

Vroom dalam Koontz, 1990 mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan. Seperti yang dinyatakan oleh Lunenburg (2011) bahwa asumsi pertama pada teori harapan ini adalah bahwa orang bergabung dengan organisasi dengan harapan tentang kebutuhan mereka, motivasi, dan pengalaman masa lalu. Ini mempengaruhi bagaimana individu bereaksi terhadap organisasi. Asumsi kedua adalah bahwa perilaku individu adalah hasil-hasil dari pilihan sadar, artinya bahwa orang bebas memilih orang-orang berperilaku yang disarankan oleh perhitungan harapan mereka sendiri. Asumsi ketiga yaitu bahwa orang ingin hal yang berbeda dari organisasi lainnya, misalkan dari segi

gaji, keamanan kerja, dan tantangan. Kemudian asumsi terakhirnya yaitu bahwa orang akan memilihi diantara alternatif sehingga dapat mengoptimalkan hasil bagi mereka pribadi.

Teori harapan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut memiliki tiga elemen kunci: harapan, perantaraan, dan valensi. Maka, seseorang termotivasi untuk meningkat karena percaya bahwa; Usaha akan menghasilkan kinerja yang baik (harapan), kinerja akan dihargai (perantaraan), serta akan menghasilkan nilai imbalan yang sangat positif (valensi). Oleh karena itu menanamkan harapan atau berekspektasi terhadap usaha yang telah dilakukan (selama usaha yang dilakukan berada di jalan yang halal) dengan bertawakkal kepada-Nya.

Sehubungan dengan beberapa asumsi terkait harapan, maka dalam Syariat Islam yang agung sangat menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan usaha halal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakkal (bersandar/berserah diri) dan meminta pertolongan kepada Allah *Ta'ala* dalam semua usaha yang mereka lakukan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62:10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu'ah/62:10).

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ;

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اخِرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ...

Terjemahnya :

“Orang mukmin yang kuat (dalam iman dan tekadnya) lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing (dari keduanya) memiliki kebaikan, bersemangatlah (melakukan) hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah (selalu) pertolongan kepada Allah, serta janganlah (bersikap) lemah...”.

Melalui ayat dan hadist di atas, dijelaskan bagaimana dalam Islam umat manusia dianjurkan untuk tetap berusaha yang dibarengi dengan Tawakkal kepada Sang Khalik. Menyerahkan segala keputusan kepada Sang Khalik sesuai dengan kerja dan usaha yang dilakukan. Adapun terkait tingkat ekspektansi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Craig C. Pinder (1948) dalam bukunya *Work Motivation* berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harapan atau ekspektansi seseorang yaitu:

- a) Harga diri.
- b) Keberhasilan waktu melaksanakan tugas.
- c) Bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak bawahan.
- d) Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas.
- e) Bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja.

Simone (2015) menyatakan bahwa harapan adalah evaluasi subjektif dari tingkat usaha yang terkait dengan kinerja dan merupakan estimasi profitabilitas untuk mencapai kinerja tersebut. Sementara teori harapan menyatakan bahwa motivasi karyawan adalah hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan

(*Valence*), yaitu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan (*Expectancy*), dan keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan (*Instrumentality*). Singkatnya, *Valence* adalah signifikansi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang diharapkan. Ini adalah kepuasan yang diharapkan dan tidak aktual bahwa seorang karyawan mengharapakan untuk menerima setelah mencapai tujuan. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan keterampilan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, ketersediaan sumber daya yang tepat, ketersediaan informasi penting dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (Roen, 2012). Dengan demikian bahwa harapan adalah keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Terkait dengan penyusunan alokasi dana desa, maka penerapan falsafah "*Panrannuangku*" yang berarti sebuah harapan ditinjau dengan teori harapan ini akan sangat mendukung penelitian ini. Faktor-faktor dan unsur-unsur teori harapan akan berjalan beriringan dengan unsur-unsur falsafah yang tertanam di dalamnya. Menanamkan sebuah harapan dalam penyusunan alokasi dana desa dengan nilai-nilai falsafah yang terkandung, akan membawa pada tingkat pengelolaan dana desa yang efisien dan sesuai harapan para pihak yang terkait.

B. Stewardship Theory

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada

sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*steward*) oleh Donaldson dan Davis, (1989-1991) yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini juga didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Stewardship Theory difokuskan pada *intrinsic reward* (penghargaan yang hakiki). Penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, prestasi, asosiasi, dan aktualisasi diri. Untuk mencapai fasilitas yang layak maka job perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan *feedback*. Pada konsep motivasi diasumsikan bahwa *Stewardship Theory* menambah motivasi kerja internal dan berperan penting untuk meningkatkan tingkat kinerja.

Stewardship Theory diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of a man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Sebagai situasi dimana para *steward* tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal. Kondisi ini didasari sikap melayani yang besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai

suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*).

Mengintegrasikan kembali urusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (prinsipal). Masing-masing pihak bersedia mempertaruhkan perbedaan kelas dan hak istimewa mereka dalam mengejar rangkaian nilai-nilai dan menciptakan sikap pro-organisasional dan rasa memiliki yang tinggi untuk memperoleh manfaat yang ditujukan langsung kepada organisasi dan tidak untuk tujuan individu, sehingga tercipta lingkungan kerja dimana setiap anggota organisasi berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik yang senantiasa menjaga dan berorientasi pada tujuan organisasi jangka panjang.

Berdasarkan asumsi *steward*, maka dalam penyusunan alokasi dana desa maupun dana desa, pihak aparat pemerintah berlaku sebagai eksekutif sepatutnya lebih mengutamakan tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan pribadi. Merupakan pihak eksekutif, maka aparat bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal yang mana keinginan tersebut dinyatakan sebagai harapan masyarakat. Jadi pihak aparat, terlebih utama harus mementingkan tujuan organisasi yaitu mensejahterahkan masyarakat dengan memenuhi harapan masyarakat kemudian barulah mereka akan memperoleh tujuan pribadi mereka dari hasil kinerja tersebut. Kondisi demikian menggambarkan adanya hubungan timbal-balik antara aparat dan masyarakat, atau pihak eksekutor dan pihak prinsipal.

C. Falsafah “*Panrannuangku*”

Makassar merupakan tatanan kehidupan masyarakat makassar yang telah ditanamkan oleh para leluhur terdiri dari beberapa wilayah. Daerah Takalar merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang dimilikinya. Daerah dengan jumlah penduduk sebanyak ± 250.000 jiwa tersebut terbentuk pada 10 Februari 1960 silam. Selain dikenal melalui spot bersejarah dan tempat wisatanya, Kabupaten Takalar juga dikenal dengan Falsafah *Panrannuangku* yang juga merupakan semboyan. Falsafah *Panrannuangku* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Siri' na Pacce*. Mustari (2012) menyatakan bahwa sebagian dari unsur-unsur *Siri' na Pacce* juga terdapat di dalam Falsafah *Panrannuangku*. Seperti unsur tanggungjawab dan keprofesionalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Beberapa unsur pokok dari falsafah ini menjadi sebuah kunci utama dalam memaknainya pada sektor pemerintahan yaitu :

1. *Tau Nirannuang*

“*Tau Nirannuang*” adalah berarti orang yang diharapkan atau orang yang diberikan sebuah kepercayaan untuk menyelesaikan sesuatu dan melaksanakan sesuatu sesuai proporsinya. Diberikan kepada orang-orang yang memiliki keterampilan atau kualifikasi tertentu. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menganut nilai unsur “*Tau Nirannuang*” adalah jujur, adil, dapat dipercaya, dan amanah. Sesuai dengan seorang Khalifah atau pemimpin alam konteks Islam yang melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip *Habblumminallah wa Habblumminannas*. Dalam konteks pemerintahan modern, “*Tau Nirannuang*”

adalah personifikasi dari seorang pemimpin. Aparat pemerintah yang mengemban nilai “*Tau Nirannuang*” di dalam batinnya akan tertanam etika yang lebih mementingkan publik dengan menanamkan dalam hatinya bahwa merekalah orang-orang pilihan yang diharapkan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sebagai aparat pemerintah.

2. *Tau Anrannuang*

“*Tau Anrannuang*”. Artinya adalah orang yang mengharapkan atau orang yang menggantungkan sebuah harapan atau keinginan. “*Tau Anrannuang*” dalam konteks pemerintahan kekinian merupakan personifikasi dari masyarakat, warga, rakyat kecil maupun orang yang dipimpin. Dalam hal ini, nilai “*Tau Anrannuang*” akan mendorong para aparat pemerintah untuk lebih akuntabel-transparan dalam melakukan pekerjaannya selaku wakil suara dari masyarakat. *Tau Anrannuang* berarti memberikan sebuah harapan yang besar kepada orang yang bersangkutan (aparatur pemerintah) untuk lebih bertanggungjawab dan lebih mewakili suara rakyat dalam menyusun sebuah anggaran atau melakukan pekerjaannya.

3. *Appakarannu-rannu*

Partisipasi aktif semua pihak akan memberikan ruang kepada pemimpin untuk mengakses beberapa informasi penting tentang kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut akan memperoleh dukungan yang lebih besar. Pola interaksi *Tau anrannuang na Tau Nirannuang* inilah yang melahirkan unsur *Appakarannu-Rannu* yang berarti menyenangkan hati, maka akan dilahirkan watak

yang dinamis, terciptanya masyarakat dengan ruang kemerdekaan untuk mewujudkan potensi kreatif anggota masyarakat yang ekspresif dan artikulatif. Pada unsur ketiga ini, aparat pemerintah dan masyarakat memberikan ruang kepada pelaku-pelaku pemerintahan untuk lebih dinamis serta mampu mewujudkan aspirasi masyarakat.

4. *Assamaturu'*

Mufakat merupakan kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama yang menciptakan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat etnik Makassar menggunakan ungkapan dalam *Kelong* yang menggambarkan nilai gotong royong dan persatuan. Ungkapan-ungkapan itu ialah *akbulo sibatang*, *akbayao sibatu*, *assamaturu*, dan sebagainya (Hasyim, 2016). Contoh *Kelong* yang mengarah pada unsur mufakat yaitu :

*“Bajikmaki’ assamaturu’ Nanikalliki boritta Ianna niak Empota
manngukrangi”*

Terjemahnya :

Kita harus bermufakat membela negara kita semoga menjadi kenangan bagi generasi berikut.

Secara denotatif, *Kelong* di atas dimaknai sebagai ungkapan yang menyerukan kerja sama dan mufakat (Hasyim, 2016). Maka *Assamaturu'* konkritnya memiliki makna penyelesaian satu perkara yang dilandasi dengan bermufakat, memperoleh suatu keputusan dari sebuah perundingan atau bermusyawarah. Dalam kemufakatan dan musyawarah, aspirasi masyarakat dipertemukan menjadi basis harmoni kehidupan bernegara.

5. *Pappasang*

Pappasang pada umumnya bernafaskan ajaran moral yang islami karena berarti sebuah pesan, amanah, dan juga berarti sebuah nasehat yang di dalamnya terkandung harapan *Tau Anrannuanga* (Jahrir, dkk. 2015). Pertanggungjawaban mencerminkan nilai amanah yang dapat mendorong pengembangan organisasi lebih efektif dan efisien. Menjadi kunci kekuasaan yang digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik. Penelitian bergendre bugis menyatakan bahwa manfaat *Pappaseng* adalah sebagai alat perekat hubungan antar individu dan sumber hukum dan peraturan, karena mampu mengetuk hati dan pikiran setiap orang supaya berlaku jujur, benar, ikhlas, berpikir menggunakan akal sehat, tahu adat istiadat, dan tahu tata krama. Makassar pun memiliki banyak petuah-petuah yang dirujuk dari *pappasang* orang tua. Salah satu *pappasang* Makassar berikut :

“Teako kaerokkangi kaerokannu, teatongko erokki ammempo ri katinggiang tannukulleai sallang nupakabajiki anne nagarayya. Niboyapako nampa battu, nijokjok pako nampa nu ioi”.

Terjemahnya :

Jangan inginkan keinginanmu, jangan juga mau duduk di tempat yang tinggi nanti kamu tidak bisa perbaiki negara ini. Nanti kamu dicari baru datang, nanti kamu ditunjuk baru katakan *iya*”.

Makna *pappasang* di atas adalah Janganlah menyerahkahi kedudukan, jangan pula terlalu menginginkan jabatan tinggi jika tak sanggup memperbaiki negara. Sebab orang yang terlalu terobsesi setelah dicari baru akan muncul, setelah ditunjuk baru akan mengaku. Meski pada dasarnya semua orang mencita-citakan kedudukan atau jabatan tinggi, tetapi takdir dan kesempatan membawa ke arah lain. Manakala

keserakahan menjadi tolak suatu cita-cita maka dalam perjalanannya, itu unsur moral akan disampingkan. Islam pun menganjurkan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan proporsinya, sebab akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti yang terkandung dalam surah Al-isra'/17:36 berikut :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Q.S. Al-Isra'/17:36).

Makna dalam ayat di atas jelas bahwa Islam menganjurkan kita untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan kita, apa yang diamanahkan, tanpa adanya penyelewengan dan kelalaian serta bekerja secara efisien dan penuh kompetensi. Dengan demikian berarti harapan-harapan masyarakat atau kepentingan umum akan didahulukan dan kepentingan pribadi akan dikesampingkan. Terlebih ketika ditunjang oleh kekuasaan, maka seseorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri dan mengemban amanah (Jahrir, dkk. 2015) karena paham akan hak dan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan kelak.

6. *Kacara'dekang*

Kacara'dekang berasal dari kata *cara'dek* yang berarti pintar atau ahli melakukan sesuatu, cerdas dalam melakukan dan mempertimbangkan sesuatu. Kecerdasan tersebut mempengaruhi tindakan seseorang. Pada saat bekerja maka seseorang akan dituntut mengarahkan intelektualnya sehingga dapat menyelaraskan

emosi, perasan, dan otak untuk menampilkan kinerja yang baik (Januraga dan Budiarta, 2015). Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa *Kacara'dekang* bisa menjerumuskan seseorang pada hal tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Namun dalam falsafah *panrannuangku, tau caraddek* ialah orang-orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk.

“Bolima kamma tuna empo kamase-mase assalak tena anu kodi ri atinku”.

Terjemahnya:

Biarlah rendah kelihatan asalkan tidak dianggap tidak baik dalam hatiku.

Pappasang ini sebagai pernyataan dari orang yang dianggap oleh pihak lain sebagai orang yang tidak baik atau hina, tetapi perbuatan dan tingkah laku serta hatinya tidak demikian. Maksud dari petuah ini adalah : sekalipun nampak seperti orang yang rendah, tetaplah bertingkah laku yang baik dan sesuai dengan aturannya. Lakukan sesuai dengan proporsi dan apa yang seharusnya dilakukan. Tersirat kecerdasan emosional dan spiritual dalam petuah tersebut.

Tena anu kodi ri atinku menjelaskan bahwa tidak ada hal jelek yang terselubung di dalam hatiku, maknanya sangat jelas bahwa tertanam rasa tanggungjawab, kejujuran yang akan membawanya pada perilaku yang baik sesuai dengan aturannya (Jahrir, dkk. 2015). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Herliansyah (2008:10) dalam Nugraha dan Ramantha (2015) bahwa profesionalisme adalah tanggungjawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme mengacu pada watak manusia yang ideal, perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi karakteristik atau menandai orang yang profesional berdasarkan pada kecerdasannya menyikapi. Cerdas

menyikapi satu perkara maka siap melaksanakan tugas yang sesuai dengan wewenang.

D. Alokasi Dana Desa

Desa merupakan tatanan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk desa itu sendiri. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diberikanlah kesempatan yang besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya baik itu akuntabilitas implisit maupun eksplisit, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Karena Huri dan Djoko (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas disebut sebagai pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada publik, maka Randa, dkk (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahkan antara dua pihak, tetapi juga menyangkut aspek moral yang selalu diperjuangkan dalam organisasi.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih dkk, 2015). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Faridah, 2015). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa juga merupakan dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa.

Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Syachbrani (2012) ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.

4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat (Wida, 2016). ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Pemberian ADD merupakan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa dalam pemberian kewenangan dalam mengurus sendiri dana desa yang telah ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa.

ADD sebagaimana yang dimaksud pada paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara

terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Maksud ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu :

1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin)
2. Pendidikan dasar
3. Kesehatan
4. Keterjangkauan desa (jarak ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
5. Jumlah penduduk
6. Luas wilayah
7. Potensi desa (target penerimaan PBB Desa per hektar).

ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala

badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

E. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mekanisme Perencanaan ADD

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam APBDDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya meliputi tahapan-tahapan berikut ini :

A. Pra Musyawarah

Pada tahap ini, Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa terkait.

B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes)

Pemerintah desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT / RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana-rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDDesa. Adapun hasil musyawarah tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Program-program yang dibiayai dalam APB Desa tahun bersangkutan
- 2) Program-program yang tidak dibiayai dalam APB Desa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbangcam tingkat kecamatan.

Mekanisme Pencairan ADD

Pencairan alokasi dana desa juga tidak begitu saja dilakukan, tetapi memiliki tahapan-tahapan sebelum masuk ke dalam program-program kerja. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1. Umum

- a) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa dalam APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- b) Rekening pemerintah Desa dibuka di Cabang PD BPR BKK masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- c) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat.
- d) Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping kecamatan.
- e) Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- f) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana, meneruskan berkas permohonan berikut

lampirannya kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

- g) Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintahan desa di masing-masing cabang PD BPR / BKK.
- h) Pencairan di tingkat Desa dilakukan oleh bendahara desa dengan membawa:
 - Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
 - Berita acara (BA) pencairan dana oleh bendaharawan desa.
- i) Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat / musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- j) Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

2. Teknis Pencairan ADD

Tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana / RPD dengan ketentuan :

- 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester pertama diajukan paling lambat telah diterima oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda pada tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Tim pelaksana desa mengirimkan pengajuan RPD kepada Tim pendamping tingkat kecamatan yang ditujukan kepala DPPKAD lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. RPD tersebut dilampiri dengan :
 - Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan (rangkap 3);
 - Nota Pencairan ADD tahap I (rangkap 2);
 - Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
 - Surat pernyataan diatas materai cukup (rangkap 2);
 - Foto Copy Rekening Kas Desa dilegalisir (rangkap 2);
 - SPJ ADD tahap 2 tahun sebelumnya yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Camat (rangkap 2);
 - Surat rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat;
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - Peraturan Desa (Perdes) Perhitungan APBDesa tahun sebelumnya;
 - SPJ dana Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten. (Rangkap 2)
- 2) Permohonan Penyaluran ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester kedua, paling lambat telah diterima oleh Bagian

Pemerintahan Desa pada tanggal 1 September tahun anggaran berjalan, dengan langkah sebagai berikut :

- a) Pencairan Tahap II (dua) setelah ADD tahap I (satu) digunakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus).
- b) Pengajuan RPD tahap II tersebut lampiri :
 - SPJ Tahap I (satu) yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Camat selaku penanggungjawab tim pendamping tingkat kecamatan;
 - Nota pencairan ADD Tahap I (satu) dan RPD ADD tahap I;
 - Nota Pencairan ADD tahap II (rangkap 2);
 - Kwitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
 - Surat Pernyataan bermaterai cukup (rangkap 2);
 - Foto Copy buku Rekening Kas Desa dilegalisir (rangkap 2)
 - Foto Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan/dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik;
 - Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. adapun beberapa tahapan penggunaan dana yaitu :

Penggunaan ADD

A. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan tingkat desa.

Penggunaan ADD dibagi menjadi 2 yaitu untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa serta biaya pemberdayaan masyarakat.

➤ Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD yang digunakan untuk:

a) Operasional Pemerintah Desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan desa untuk :

- Belanja barang dan jasa : Pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana Pemerintah Desa, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Operasional Pemerintah Desa dan,
- Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Operasional Pemerintah Desa untuk honor tim pelaksana desa.

b) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Belanja pemerintahan desa dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD.

c) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari belanja Pemerintah Desa.

➤ Pemberdayaan masyarakat 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari belanja Pemberdayaan Masyarakat dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
- Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
- Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- Tehnologi tepat guna;
- Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- Pengembangan sosial budaya; dan/atau
- Kegiatan lainnya yang dianggap penting.

b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari belanja Pemberdayaan Masyarakat, yang digunakan untuk Belanja barang dan Jasa; Belanja Pegawai yang meliputi:

- Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Penunjang kegiatan LPMD;
- Penunjang kegiatan RT/RW;
- Penunjang kegiatan Karang Taruna, dan/atau
- Penunjang kegiatan Hansip

B. Untuk Ploting/pembagian besaran dana ADD yang digunakan untuk tunjangan Perangkat Desa, Honor Bendahara Desa dan Penguatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan selain penunjang kegiatan PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing desa sesuai dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- C. Rincian penggunaan ADD selama satu tahun dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa.

F. Nilai Kearifan Panrannuangku Ditinjau dari Expectancy Theory

Pada konteks pemerintahan, falsafah “*Panrannuangku*” bisa diakselerasi sebagai gagasan pokok dalam membangun masyarakat yang amanah, bersih dan bertanggungjawab. Salah satu penerapannya, mampu ditanamkan pada model kepemimpinan *Tau Nirannauang* yang akan mengacu pada pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat yang meletakkan amanahnya serta menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Para pemimpin yang berorientasi pada falsafah “*Panrannuangku*” harus mampu mengarahkan konsentrasinya pada tiga hal. Pertama, *Community Oriented*, bahwa para pemimpin harus mampu merespon kebutuhan nyata masyarakat lokal untuk diberikan alternatif pemecahan. Kedua, *Community Based* bahwa para pemimpin harus mampu mendorong pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk menunjang pembangunan dan ketiga, *Community Managed* bahwa pemimpin harus mampu mengelola keterlibatannya di tengah masyarakat untuk menggerakkan potensi berdasarkan sumber yang dimiliki mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dengan berbagai problematikanya. Untuk menggambarkan hal tersebut dapat kita lihat dalam papatah berikut ini :

*Takunjunga' bangun turu'
Nakugunciri' gulingku
Kualleangna talaanga natolia*

Terjemahnya :

"saya tidak akan begitu saja mengikuti arah angin, dan tidak begitu saja memutar kemudi saya. Saya lebih suka tenggelam dari pada kembali." Maksudnya, kalau langkah sudah terayun, maka pantang bagi saya untuk kembali ke belakang dengan tangan hampa tanpa hasil.

Ditinjau dari sudut *Expectancy Theory*, maka kita dapat melihat bagaimana salah satu unsur falsafah di atas mengandung unsur-unsur harapan Victor Vroom yang melihat motivasi sebagai landasan dalam kinerja mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Terlebih lagi Terkait kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai unsur falsafah "*Panrannuangku*", maka dalam Roen (2011) Ada 4 gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert J. House yang berakar dari model teori harapan yang dikembangkan Victor Vroom :

1. Kepemimpinan direktif

Pemimpin ini memberikan pedoman yang memungkinkan bawahan tahu apa yang diharapkan dari mereka, menetapkan standar kinerja bagi mereka, dan mengontrol perilaku ketika standar kinerja tidak terpenuhi.

2. Kepemimpinan suportif

Pemimpin yang sifatnya mengayomi bawahan dan menampilkan perhatian pribadi terhadap kebutuhan, dan kesejahteraan mereka.

3. Kepemimpinan partisipatif

Pengambilan keputusan pada kelompok/ berbagi informasi dengan bawahan.

4. Kepemimpinan berorientasi prestasi

Pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mendorong karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Gaya ini sama dengan pandangan teori penetapan tujuan.

Terkait dengan penyusunan alokasi dana desa, kita dapat melihat falsafah mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa melalui kepemimpinan “*Tau Nirannuang*” yang masuk dalam kategori gaya kepemimpinan yang mengandung nilai-nilai teori harapan, Simone (2015) menyatakan bahwa pemimpin harus mencoba untuk meningkatkan keyakinan bahwa kinerja yang baik berdasarkan harapan akan menghasilkan imbalan yang berharga, yang dihargai dan baik pula. Maka nilai-nilai falsafah yang lain juga mampu memberikan hasil pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik. Hal tersebut dapat diperoleh dalam nilai kearifan yang terkandung dalam unsur-unsur falsafah “*Panrannuangku*” yang lain seperti nilai-nilai yang terkandung pada unsur *Tau Anrannuang*, *Appakarannurannu*, *Assamaturu*’, *Pappasang*, serta *Kacara’dekan*.

G. Penempatan Unsur-unsur Pokok Kearifan Panrannuangku dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penjabaran kewenangan desa tersebut merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi sehingga merupakan tanggung jawab yang besar pemerintah dan aparat-aparat desa. Alokasi dana desa tersebut

tidak begitu saja dialokasikan ke dalam program pengelolaan alokasi dana desa. Ada beberapa mekanisme yang dilalui untuk menjalankan program dana desa tersebut. Secara kronologis, perencanaan alokasi dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



1. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan.
3. Tim palaksanan desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta pada skala priorotas hasil musrembang tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip pengelolaan keuangan ADD. Mekanisme-mekanisme yang dilalui oleh pengelolaan alokasi dana desa tersebutlah yang merupakan bagian penyusunan alokasi dana desa yang patut tersentuh unsur kearifan lokal. Secara garis besar, unsur-unsur pokok kearifan *Panrannuangku* menjadi landasan dalam penyusunan alokasi dana desa sebelum dialokasikan ke dalam program yang akan dilaksanakan. Adapun unsur-unsur pokok kearifan *Panrannuangku* tersebut yaitu; *Tau nirannuang*, *Tau Anrannuang*, *Appakarannu-rannu*, *Assamaturu*, *Pappasang*, dan *Kacaraddekang*.

Unsur yang pertama yaitu *Tau nirannuang*. Unsur yang pertama ini berarti orang yang diharapkan, merupakan unsur penting diterapkan oleh kepala desa dalam mengambil keputusan pada saat penyusunan alokasi dana desa, terutama pada saat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ini bisa diterapkan pada saat pelaksanaan musyawarah juga dalam mekanisme yang lain, selama penempatannya difokuskan pada eksekutor yang diamanahkan harapan masyarakat.

Beralih pada unsur kedua yaitu *Tau Anrannuang* yang berarti orang atau masyarakat yang menggantungkan harapannya. Dalam unsur ini terkandung nilai harapan masyarakat yang perlu pertanggungjawaban aparat desa atau pemerintah dalam setiap program yang dilaksanakan. Penempatan unsur ini juga menempati

ruang mekanisme penyusunan alokasi dana desa sebelum dialokasikan dalam program-program dan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya yaitu unsur *Appakarannu-rannu*, sebenarnya hampir sama penempatannya dengan unsur sebelumnya karena pada unsur ini aparat pemerintah dan masyarakat memberikan ruang kepada pelaku-pelaku pemerintahan lebih dinamis dan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga cocok ditempatkan pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Seperti yang dinyatakan oleh Sulumin (2015) bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena di lapangan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dilihat dari kebutuhan mereka tentang menentukan kebutuhan yang selaras dengan aspirasi dan keinginannya, juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan dalam memberikan masukan.

Unsur selanjutnya yakni unsur *Assamaturu'* ialah unsur yang menganjurkan sebuah musyawarah, mufakat, kerjasama dan gotong-royong. *Assamaturu'* dalam unsur yang digunakan dalam penelitian ini berupa mufakat yaitu kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama yang menciptakan nilai demokrasi. *Assamaturu'* mengandung harapan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat atau argumen. Maka unsur ini tepat diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa untuk menghindari

ketimpangan pendapat dan mempererat nilai demokrasi pada pengelolaan kegiatannya. Arti musyawarah dapat diimplementasikan pada mekanisme pengelolaan alokasi dana desa atau pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa.

Unsur *Pappasang* yang bernafaskan ajaran moral yang islami berarti sebuah pesan, amanah, akuntabilitas, dan juga berarti sebuah nasehat yang di dalamnya terkandung harapan *Tau Anrannuanga* atau orang-orang yang mengamanahkan harapannya. Nilai amanah dalam unsur ini dapat mendorong pengembangan organisasi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, maka unsur ini dapat diimplementasikan dalam mekanisme pencairan alokasi dana desa.

Pada tahapan mekanisme ini masih tergolong ke dalam penyusunan alokasi dana desa. Selain itu, unsur ini juga bisa diterapkan dalam pramusyawarah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa sebab nilai yang terkandung tidak hanya sebatas pada pertanggungjawaban, melainkan terdapat amanah yang dititipkan kepada para tokoh masyarakat untuk mengaspirasikannya dalam musyawarah dan mufakat terkait pengelolaan alokasi dana desa.

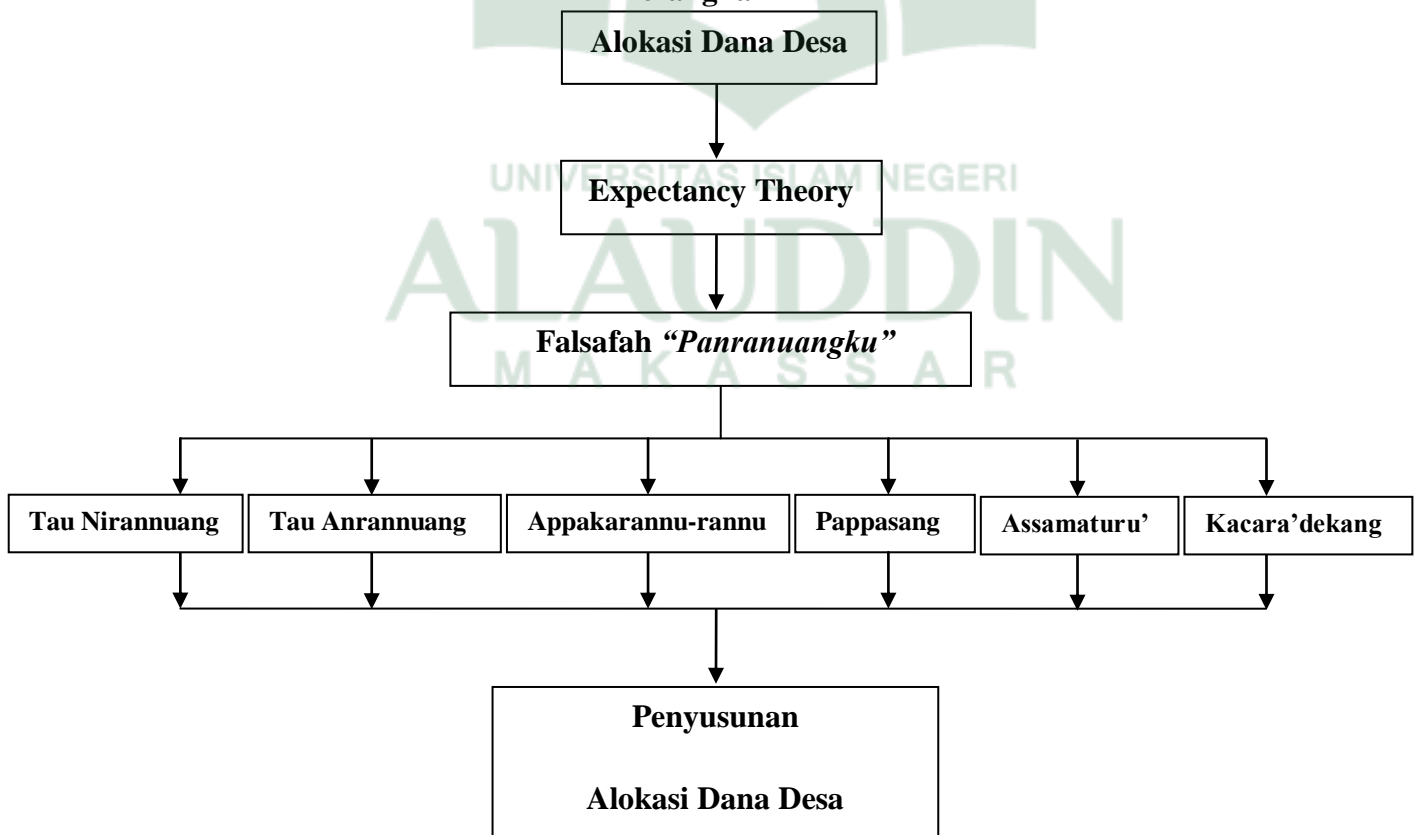
Terakhir, unsur *Kacaraddekang* berarti kepintaran dan keahlian seseorang yang mengandung nilai kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, serta kecerdasan spiritual. Unsur ini mengandung banyak hal yang mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan alokasi dana desa. Terlebih ketika diterapkan pada saat penganggaran alokasi dana desa dan penetapan program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga secara emosional, maka para aparat memberikan sebuah pertimbangan khusus dalam menetapkan satu keputusan, secara intelektual mampu

mempertimbangkan *feedback* demi kemaslahatan bersama, serta secara spiritual mampu memberikan akuntabilitas secara *Habblumminallah Wa Habbluminannas*. Melihat beberapa mekanisme sebelum dialokasikannya dana desa, maka secara garis besar unsur *Tau nirannuang*, *Tau Anrannuang*, *Appakarannu-rannu*, *Assamaturu'*, *Pappasang*, dan *Kacaraddekan* bisa diimplementasikan dalam beberapa mekanisme. Demi memperoleh efisiensi pengelolaan dana desa yang mumpuni.

H. Rerangka Pikir

Alur pemikiran implementasi Falsafah “*Panrannuangku*” dalam penyusunan alokasi dana desa di salah satu desa pada Kabupaten Takalar, yaitu Desa Cakura yang ditinjau dengan menggunakan *Expectancy Theory* dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.2
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Moleong (2002) dalam Agustin, dkk (2014) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian.

Tingkat efisiensi pengelolaan dana desa menjadi pijakan penelitian ini dengan menyandingkan unsur budaya dalam pengimplementasiannya. Melalui unsur-unsur yang terkandung dalam falsafah “*Panrannuangku*” yang kemudian ditinjau dengan menggunakan *Expectancy Theory* dianggap mampu menjadi pijakan dalam penyusunan alokasi dana desa yang diharapkan mampu melahirkan efisiensi bagi pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh hasil yang sesuai karena dianggap mampu

menjelaskan kondisi terkait dan memberikan *win win solution* bagi kedua belah pihak.

Adapun data dan informasi diperoleh penulis dengan melakukan penelitian tersebut di Kantor Desa Cakura Kabupaten Takalar. Hasil penelitian yang hendaknya diperoleh tersimpul dari wawancara dengan beberapa objek penelitian. Objek yang menjadi informan tersebut merupakan aparat-aparat desa yang terlibat langsung dengan penyusunan alokasi dana desa, tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yang tersentuh dengan program-program alokasi dana desa, serta budayawan yang merupskan penerus warisan para leluhur. Lokasi tempat penelitian ini yaitu Kantor Desa Cakura Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu kantor desa pemekaran dari Bulukgunyi yang sekarang merupakan Kelurahan di Daerah Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi dan paradigma kritis. Teknik etnografi yang dikembangkan oleh Spradley tahun 1980 tersebut sangat penting dikuasai oleh peneliti yang berparadigma kualitatif agar bisa memahami karakteristik sebuah komunitas secara lebih komprehensif (Koeswinarno, 2015). Dimana tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Arti lainnya adalah etnografi mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat. Objek etnografi adalah kebudayaan yang memiliki unsur eksplisit dan implisit. Penelitian tentang unsur-unsur kebudayaan yang eksplisit dapat dilakukan

dengan mudah karena unsur-unsur kebudayaan seperti itu relatif terungkap oleh partisipan secara sadar. Sebaliknya, penelitian berhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan yang implisit, yang tercipta dan dipahami secara tidak sadar oleh pemiliknya, maka data dan makna harus disimpulkan secara hati-hati berdasarkan penuturan dan tingkah laku para partisipan. Hal inilah yang membuat seorang etnografer perlu terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dengan berperan sebagai pengamat berpartisipasi (*participant-observer*).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode riset dengan observasi langsung terhadap penyusunan alokasi dana desa untuk mengetahui tindakan dan sikap-sikap para aparat yang kemudian dikritisi dan disandingkan dengan unsur budaya setempat baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penyusunan alokasi dana desa dengan sentuhan falsafah “*Panrannuangku*” dengan *Expectancy Theory* sebagai kacamata peninjau.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah melakukan wawancara

langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di kantor Desa Cakura, Kabupaten Takalar.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, akan tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya adalah berupa dokumen/laporan terkait pengelolaan dana desa, serta beberapa artikel terkait falsafah "*Panrannuangku*".

D. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi ini merupakan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung subjek yang akan diteliti. Dalam metode ini akan dilakukan observasi terhadap hasil kegiatan-kegiatan yang berasal dari penggunaan alokasi dana desa sehingga efisiensi pengelolaan alokasi dana desa, mampu disandingkan dengan penerapan nilai kearifan falsafah "*Panrannuangku*".

b. Interview (Wawancara)

Yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang kemudian dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini memilih kepala desa, tokoh masyarakat dan budayawan takalar sebagai sumber informasi wawancara atau kerap disebut sebagai informan penelitian. Kepala desa dalam hal ini menjadi informan pertama yang merupakan pemimpin berjalannya segala kegiatan dalam

program desa. Selanjutnya adalah tokoh masyarakat selaku salah satu objek aparat desa dalam program ADD dan merupakan bagian perencanaan ADD. Terkait penerapan nilai kearifan lokal falsafah “*Panrannuangku*”, maka budayawan asli Takalar yang secara signifikan tumbuh dan paham mengenai nilai-nilai falsafah Daerah Takalar turut menjadi informan penelitian ini sehingga mampu memberikan keterangan lebih lanjut terkait nilai yang terkandung dalam unsur-unsur falsafah yang kemudian mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan alokasi dana desa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai dan atau terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya untuk memperoleh informasi yang lebih untuk menunjang hasil penelitian. Dalam metode ini penulis menyelidiki data-data tertulis seperti laporan penyusunan dan pengelolaan dana desa serta beberapa artikel terkait pengelolaan dana, jurnal dan beberapa artikel terkait falsafah “*Panrannuangku*”.

E. Instrumen Penelitian

Media yang digunakan dalam penelitian ini berupa handphone untuk merekam hasil wawancara, kamera untuk melakukan dokumentasi pada saat wawancara dan mengabadikan beberapa data dalam kondisi tertentu, draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau informasi yang diperoleh serta draft observasi. Laptop dan modem untuk mengakses beberapa jurnal dan artikel.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Oleh sebab itu, teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisa terlebih awal dengan mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pengklasifikasian data tersebut adalah untuk memisahkan data yang relevan dan bermakna sehingga data terfokus untuk pemecahan masalah serta pemaknaan dalam menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Tahap selanjutnya adalah menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data-data yang telah terklasifikasi. Kemudian data disajikan dalam beberapa bentuk baik itu berupa narasi, gambar, atau tabel untuk memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dan beberapa garis besar dari data yang terkumpul sehingga memberikan hasil penelitian mumpuni.

G. Pengujian keabsahan data

Metode triangulasi data merupakan metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi data dapat diartikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan penelitian ini, yaitu Triangulasi sumber data yang berarti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan

sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

Metode selanjutnya yang digunakan yaitu Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *Thesis Statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini teori *Expectancy* atau teori harapan yang sejalan dengan kearifan falsafah *Panrannuangku*. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Metode selanjutnya adalah Triangulasi metode, dimana metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran umum lokasi penelitian akan menyajikan tiga gambaran umum desa yang mencakup kondisi geografis yang akan menjelaskan kondisi desa dari segi keadaan geografis (faktor-faktor alami dan potensi suatu wilayah), kondisi demografis yang akan menjelaskan kondisi kependudukan, desa tempat meneliti, dan struktur organisasi desa terkait dalam penyelenggaraan desanya.

1. Kondisi Geografis

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peranan penting, hal tersebut karena dapat mengetahui hubungan faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah maka akan tergambar aktivitas-aktivitas yang dimiliki oleh wilayah dan berfungsi sebagai satu wahana yang menampung penduduk dan segala aktivitas di dalamnya.

Gambar 4.1
Peta Desa Cakura



Cakura merupakan salah satu desa yang berdomisili di Kabupaten Takalar yang terletak di Kecamatan Polombangkeng Selatan. Berada pada ketinggian 71 Mdpl, dengan curah hujan sedang, dataran Cakura berjarak tempuh ± 2 km dari Kecamatan, ± 8 km dari Kabupaten/Kota, dan ± 197 km dari Provinsi. Luas wilayah desa ini $\pm 16.187.526$ Ha dan koordinat bujurnya 32° dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Lantang
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Su'rulangi'
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono
 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Bulukgunyi'

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Cakura tahun ini (2017) sekitar 848 KK (Kepala Keluarga) dengan perbandingan laki-laki 1.306 jiwa dan perempuan sebanyak 1.442 jiwa, maka total secara keseluruhan jumlah penduduk 2.748 jiwa. Jumlah ini termasuk potensial merupakan asset berharga Desa Cakura untuk diberdayakan sebaik dan sebijak mungkin. Data asset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sektor Matapencapaian Desa Cakura

No.	Sektor Matapencapaian	Jumlah (Orang)
	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Tangan RT	-
	Sektor Industri Menengah dan Besar	-
	Sektor Jasa	
	- Kontraktor	2

	- Pegawai Negeri Sipil	50
	- TNI	11
	- POLRI	5
	- Bidan Swasta	2
	- Perawat Swasta	14
	- Paranormal	1
	- Jasa Pengobatan Alternatif	1
	- Guru Swasta	20
	- Pensiunan Swasta	2
	- Sopir	23
	- Wiraswasta Lainnya	20
	- Petani	1.626

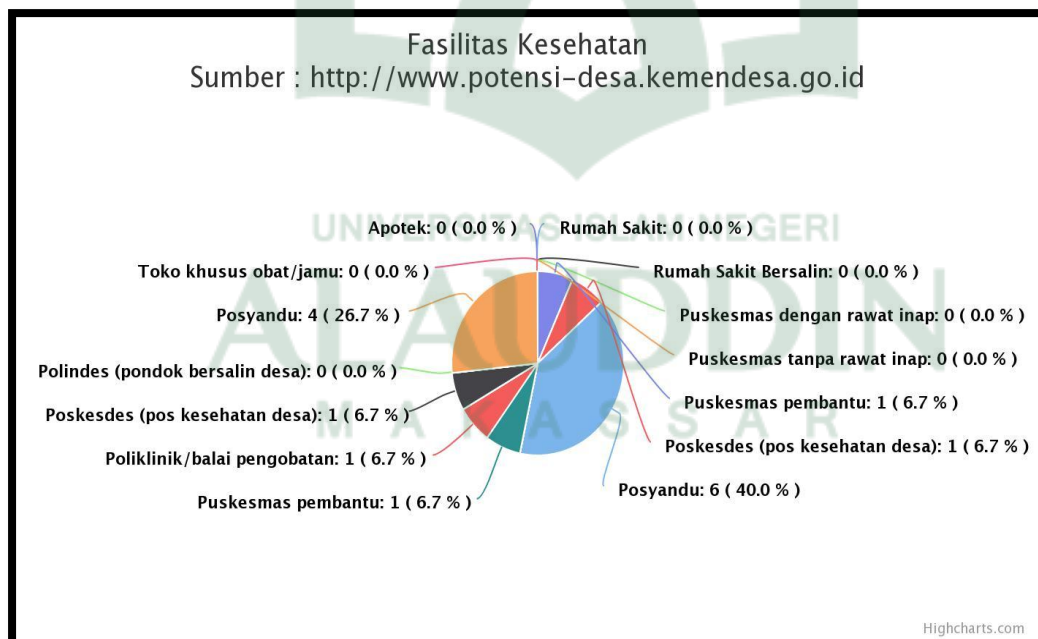
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cakura adalah mayoritas bersektor matapencaharian sebagai petani dan sebagian diantaranya merupakan pegawai negeri dan wirausaha.

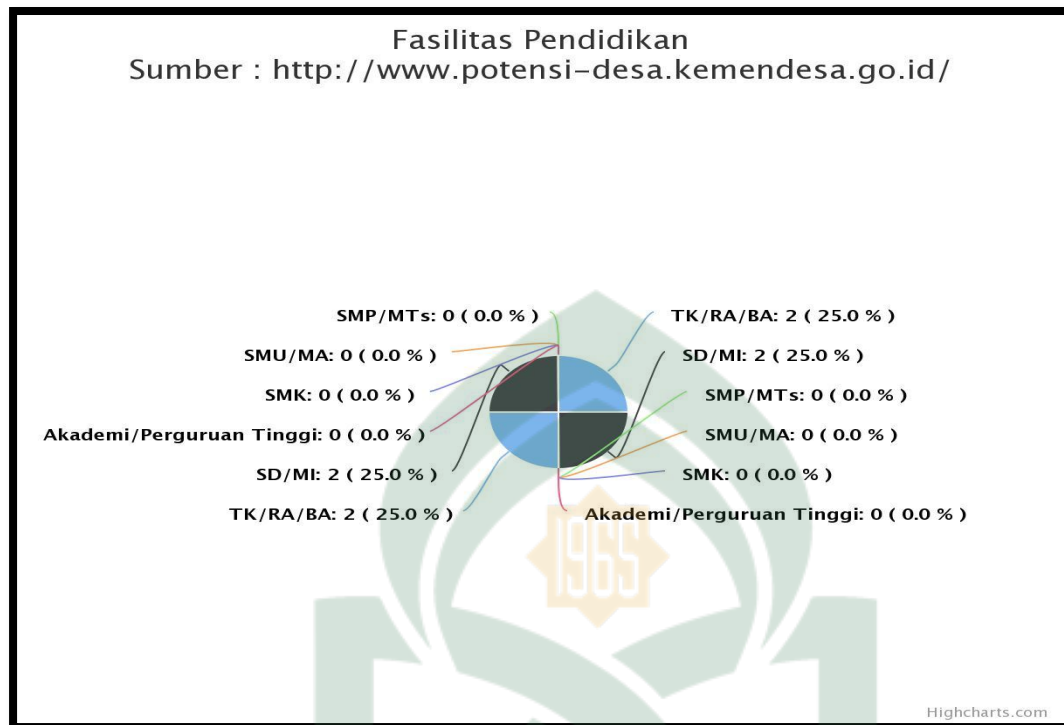
Tabel 4.2
Penguasaan Aset Ekonomi Desa Cakura

No.	Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat	Jumlah (Orang)
	A. Aset Tanah	
	B. Aset Transportasi Umum	
	- Memiliki ojek	5 unit (5 orang)
	C. Aset sarana produksi	
	- Memiliki penggilingan padi	11
	- Memiliki traktor	250

Melihat kondisi geografis Desa Cakura, hingga sektor matapencaharian dan sektor penguasaan aset ekonomi masyarakatnya, maka Desa Cakura merupakan desa dengan sumber ekonomi dari lahan pertanian dan perkebunan yang diberdayakan. Petani sebagai sektor matapencaharian terbesar serta aset ekonomi yang dimiliki berupa sarana untuk bertani menunjukkan kondisi Desa Cakura sebagai desa yang berkembang. Lahan yang dimiliki juga mumpuni untuk diberdayakan oleh masyarakat setempat. Adapun dari data statistik Desa Cakura, diperoleh beberapa data terkait fasilitas kesehatan Desa Cakura yang masih minim. Demikian pula dengan fasilitas pendidikan yang hanya sampai pada tingkat TK dan Sekolah Dasar (SD). Berikut diagram yang mencerminkan fasilitas kesehatan di Desa Cakura :

Gambar 4.2
Diagram Fasilitas Kesehatan Desa Cakura



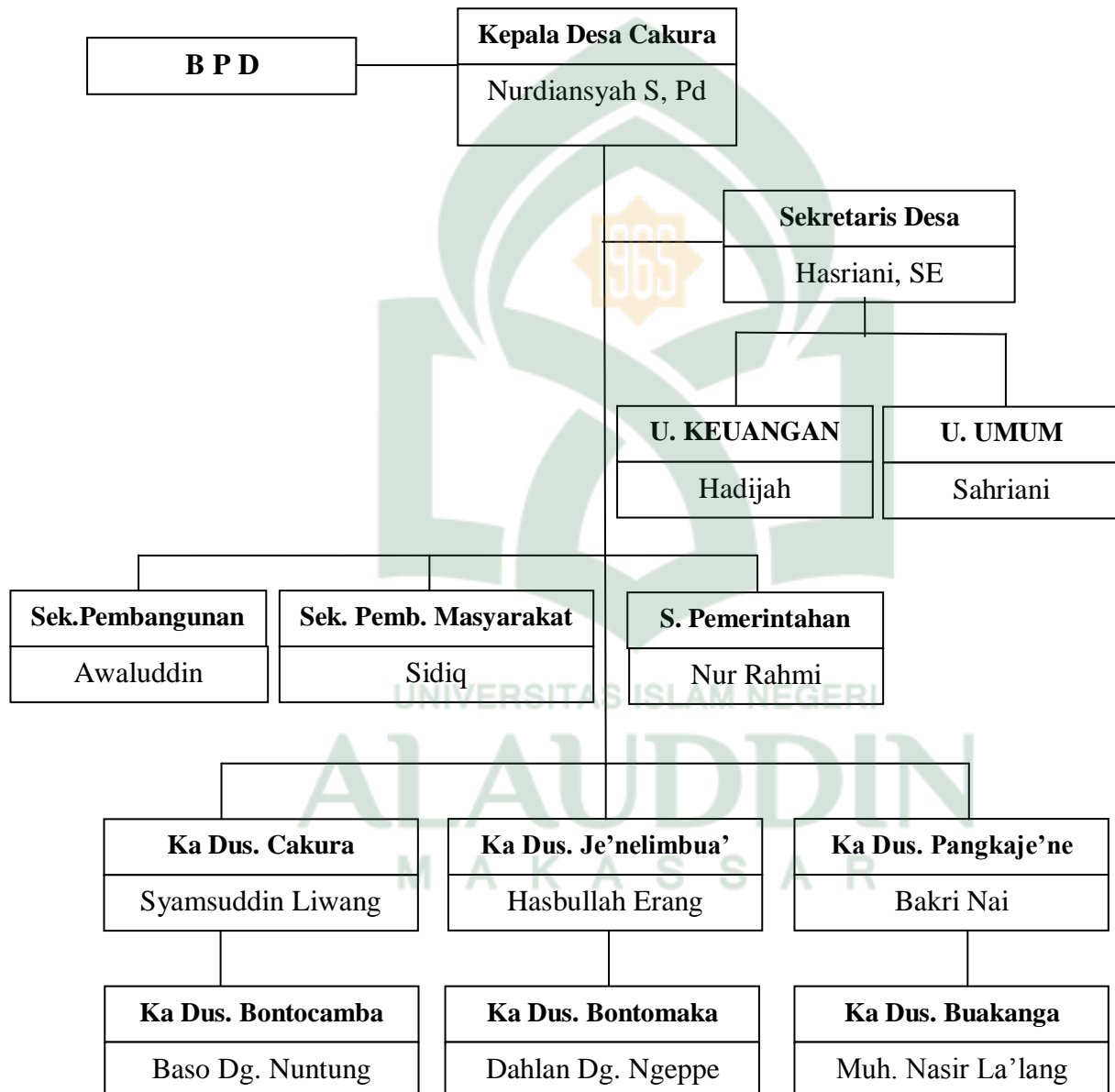


Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Cakura berada pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang terbilang cukup untuk melingkupi area pedesaan. Namun berdasarkan diagram tersebut tergambar bahwa fasilitas pelayanan kesehatan jauh lebih memadai dibanding dengan fasilitas pendidikan yang ada.

3. Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa

Gambaran sistem pemerintahan Desa Cakura, dapat tegambar dalam bagan berikut ini :

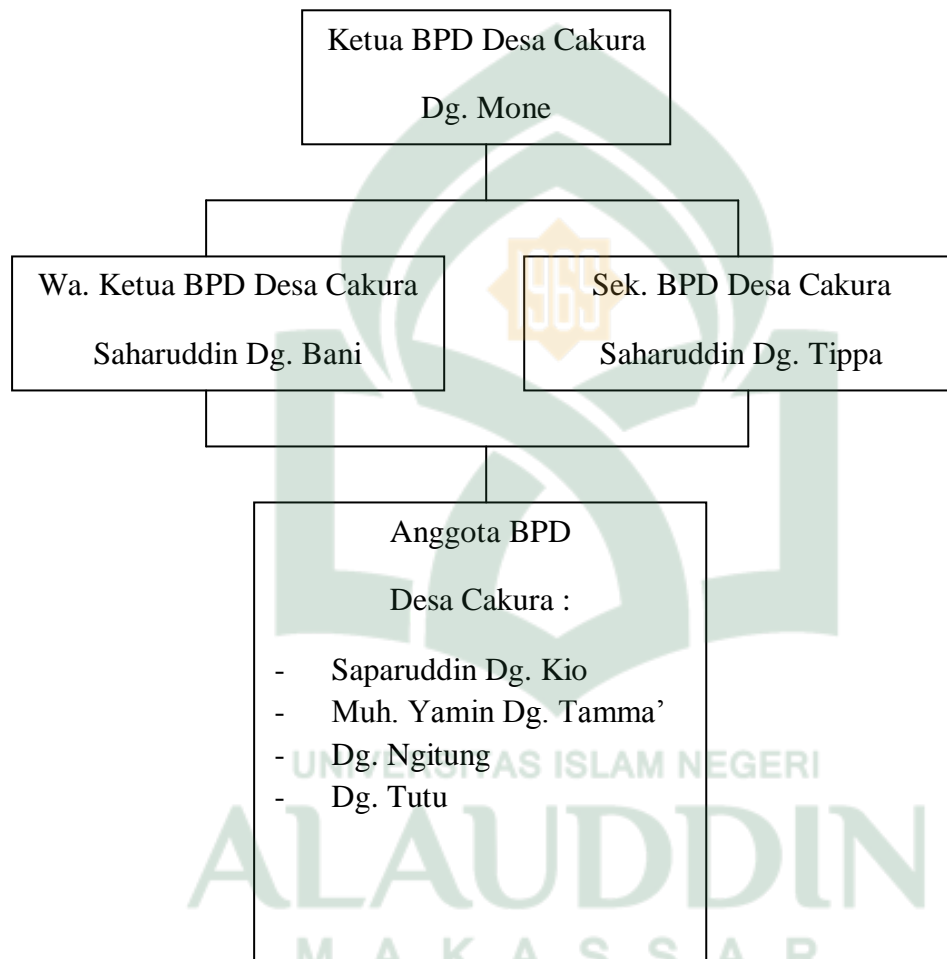
Gambar 4.4
Struktur Organisasi Penyelenggara Desa Cakura



4. Susunan Keanggotaan BPD Desa Cakura

Adapun susunan struktur keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cakura, tergambar dalam bagan berikut :

Gambar 4.5
Struktur Keanggotaan BPD Desa Cakura



B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Nilai Kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura Ditinjau dari *Expectancy Theory*

Panrannuangku, semboyan sekaligus satu kearifan lokal daerah Takalar bukan sekedar semboyan bagi masyarakat dan juga bagi pemimpinnya akan tetapi merupakan sebuah prinsip dalam bermasyarakat. *Panrannuangku* yang berarti harapan merupakan dasar atau landasan untuk memperoleh sesuatu yang erat kaitannya dengan kemakmuran orang-orang yang berada dalam lingkup wilayah Takalar itu sendiri. Kemakmuran tersebut layaknya dari hasil kerja keras seorang pemimpin yang bekerjasama dengan aparat-aparatnya yang tak luput dari campurtangan masyarakat itu sendiri.

Expectancy theory memperlihatkan penekanan pada hasil (*outcomes*) dibandingkan dengan kebutuhan sangat terikat dengan intensitas harapan. Intensitas mencapai tujuan ialah yakin bahwa tindakan akan mengarah kepada tujuan. Keyakinan tersebut didasari oleh harapan akan sesuatu, oleh sebab itu harapan merupakan bagian dalam segala tindakan yang dilakukan. Karena harapan ialah bentuk dasar dari kepercayaan pada apa yang diinginkan akan didapatkan dan berbuah kebaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kinerja karyawan dinyatakan oleh Roen (2012) bahwa adanya harapan baik itu berupa imbalan dalam kinerja akan memberikan kualitas dalam kinerja itu sendiri. Maka nilai “*panrannuangku*” dari sudut *Expectancy theory* dalam praktik sektor publik,

spesifiknya pada pengelolaan Dana Desa menuju pembangunan daerah yang efisien, perlu pemahaman mendalam. Harapan dalam kinerja perlu dikaji dan dipahami mendalam seiring nilai “*Panrannuangku*” yang didefinisikan sebagai harapan sesuai dengan pernyataan berikut ini:

“Takalar itu *Panrannuangku*, Butta *Panrannuangku* : tanah harapan, terdepan dalam pelayanan. Sehingga sebagai orang yang bertanah kelahiran di sini, jelas menanamkan harapannya tinggi-tinggi untuk mendapatkan kemakmuran. Dalam pemerintahan, kami memberikan pelayanan secara terdepan agar harapan masyarakat terpenuhi demi tercapainya Takalar yang terdepan”. (Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Cakura, Tanggal 27 September 2017).

Menaruh harapan demi kemakmuran menunjukkan peranan sebuah “harapan” dalam tercapainya satu tujuan dengan memberikan pelayanan dan kinerja secara terdepan agar harapan masyarakat terpenuhi dan memberikan *feedback* kepada para aparat. Pelayanan dan kinerja terdepan dilaksanakan semata-mata bukan karena satu imbalan yang mumpuni terhadap aparat itu sendiri, tetapi ada hubungan timbal-balik diantara keduanya. Demikian dalam *stewardship theory* yang juga menekan tujuan pribadi dan mengutamakan tujuan organisasi yang dalam hal ini pemenuhan harapan masyarakat untuk pelayanan kinerja yang akurat. Sehingga harapan yang harus tercapai demi satu harapan lain di dalamnya memacu adanya *feedback*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut ini :

“*Panrannuangku* itu kan asal katanya “harapanku”, jadi kalau bupati bilang *Panrannuangku* kepada masyarakat takalar, artinya harapanku terhadap masyarakat Takalar. Sehingga inilah yang mendasari kita secara umum dalam melaksanakan pemerintahan atau kegiatan apapun, selalu melibatkan masyarakat sehingga ada *feedback* antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi pemerintah menaruh harapannya kepada masyarakat sementara masyarakat juga menaruh harapannya kepada pemerintahnya. Jadi ada hubungan timbal

balik di sini, keduanya memiliki keterlibatan dan keterikatan satu sama lain”.
(Hasil wawancara dengan kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Pelayanan yang diberikan oleh para aparat untuk mencapai misi dari pernyataan di atas dilandasi oleh adanya hubungan timbalbalik antara pemerintah-aparat dan masyarakat. Hubungan tersebut terbangun dengan adanya harapan diantara keduanya yang kemudian akan melahirkan sebuah hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah selaku pelaksana akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan harapan agar kemakmuran masyarakat tercapai dan mereka bisa mendapatkan imbalan berupa kepercayaan masyarakat dan juga sebuah imbalan berupa gaji dari pemerintah pusat, dan yang terpenting adalah tujuan seorang pemimpin adalah dipilih pada periode selanjutnya. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam syariat islam dinyatakan bahwa segala perbuatan yang baik akan berbuah kebaikan pula seperti pada ayat Al-Qur'an Berikut ini :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat Dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (Q.S. Az-Zalzalah/99:7).

Ayat diatas sangat jelas bahwa perbuatan yang baik akan berbuah kebaikan suatu saat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Malihat lagi Maha Mendengar, maka tak satupun kebaikan hamba-Nya yang luput dari-Nya maka langsung akan tercatat berbalas dengan kebaikan pula mseki kebaikan yang diperbuatnya hanya sebesar biji dzarrah. Maka niat baik seseorang dalam kinerjanya akan membuahkan hasil yang baik pula, harapan memberikan pelayanan terdepan dengan niat baik merupakan salah satu bentuk kebaikan.

b. Penempatan Unsur-Unsur Pokok Kearifan “*Panrannuangku*” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura

Dana desa yang menjadi sorotan pemerintah pusat saat ini, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, dana yang terbilang cukup besar itu harus digunakan sebagaimana fitrah tujuannya. Bagi sebagian pemerintah dan aparat desa, Dana Desa merupakan bisa ular yang ketika digunakan dengan baik akan menjadi obat bagi masyarakat setempat dan akan menjadi racun ketika pengelola tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seperti pernyataan berikut ini :

“Dana Desa itu dek seperti Bisa Ular, kalo bisa diolah dengan baik akan jadi obatki. Tetapi kalo misalkan tidak diolah dengan baikki, akan jadi racunki. Nah, makanya saya sering berpesan kepada pak desa bahwa beliau harus berhati-hati terhadap dana desa ini. Sebab dana tersebut sebenarnya amanah yang bisa mencederai. Dana ini luar biasa dek, sedikit kita tergiur dan salah dalam mengelolanya maka hancurlah desa dan isinya”. (Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Cakura, 27 September 2017).

Pernyataan di atas cukup memberikan gambaran bagaimana sensitifnya dana desa sebagaimana dengan pernyataan berikut ini :

“Dana desa merupakan dari yang berasal dari pemerintah pusat dan langsung ditransfer langsung ke dalam rekening desa. Adapun beberapa penganggrannya diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, drainase, infrastruktur dan lain sebagainya. Adapun penggunaan dana desa tersebut, kepala desa dalam hal ini merupakan penanggungjawab mutlak dan pengguna anggaran yang tidak bisa dipihakketigakan sampai hari ini. Jadi, kalau ada kepala desa yang pihakketigakan kegiatan pembangunan desa maka siap-siap saja diperiksa!”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Oleh karena itu, dalam penyusunannya perlu pengendalian mendasar sebagai pengendalian internal menuju pengelolaan Alokasi dana desa yang efisien. Peljan Dan Metka (2008) menyatakan bahwa adanya pengendalian internal akan menunjang

kinerja organisasi lebih terarah. Selain itu juga untuk menghindari tindak penyelewengan dana desa yang kerap terjadi maka dibutuhkan sebuah landasan. Dalam hal ini, nilai dalam falsafah *Panrannuangku* bisa dijadikan sebuah pondasi yang kuat. Adapun beberapa unsur-unsurnya yaitu; *Tau nirannuang*, *Tau Anrannuang*, *Appakarannu-rannu*, *Assamaturu*, *Pappasang*, dan *Kacaraddekang* mengandung nilai-nilai yang memiliki ruang untuk menata pondasi kinerja pengelolaan alokasi dana desa melalui penyusunan alokasi dana desa itu sendiri.

Unsur *Tau nirannuang*, konteks seorang pemimpin yang merupakan orang-orang pilihan dengan kualifikasi tertentu sehingga mampu menjalankan dan mengkoordinir suatu organisasi maupun suatu wilayah daerah. Pengelolaan alokasi dana desa memusatkan masyarakat pada sosok seorang kepala desa maka unsur salah satu kualifikasi *Tau nirannuang* jatuh pada sosok kepala desa. Adapun dalam penyusunan alokasi dana desa, peran seorang kepala desa sebagai pusat *Tau nirannuang* (orang harapan), seperti pada pernyataan berikut ini :

“Kepala desa itu adalah orang yang *dirannuang* di desanya, sehingga *panrannuang* itu adalah merupakan satu amanah jangan dikhianati *panrannuang* rakyat. Mau tidak mau, terima tidak terima, saya adalah orang yang *dirannuang* masyarakat cakura untuk mengurus masyarakat cakura *eroki teai*, *pasti nakke nirannuang amperhatikangi cakura* selama masa kepemimpinan saya. Jadi jangan khianati itu *Panrannuang*”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Merasa sebagai pusat harapan masyarakat maka, Kepala Desa mutlak memberikan pelayanan terdepan sesuai makna *panrannuangku*, nilai amanah, nilai jujur, adil dan dapat dipercaya demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan alokasi dana desa sosok kepala desa mengambil

tanggungjawab penuh demi pelaksanaan alokasi dana desa yang matang. Pada sisi lain, konteks *Tau nirannuang* tidak hanya mengarah pada sosok seorang pemimpin/kepala desa semata. Pada sektor penyusunan alokasi dana desa dan penyusunannya, sosok aparat-aparat desa tidak luput dari sosok *Tau nirannuang* Seperti pernyataan berikut ini :

“Sosok *tau nirannuang* bukan Cuma kepala desa, aparat pun termasuk. Namun di luar kepala desa, mereka belum bisa diharapkan secara utuh masih perlu adanya pembinaan di desa, terutama para aparat-aparat desa dan perangkat desa”. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Pengakuan seorang ketua BPD menyiratkan bahwa sisi *Tau nirannuang* merupakan sosok yang memang benar-benar memiliki kualifikasi tertentu yang mana kualifikasi tersebut berada pada bagaimana mereka mampu menjalankan tugas pokok masing-masing dalam penyusunan alokasi dana desa sehingga program alokasi dana desa kasat mata berjalan sesuai dengan tujuan utama perencanaan. Aparatur sendiri menganggap bahwa sosok *tau nirannuang* sebatas pemimpin atau kepala desa semata sehingga kinerjanya sebatas pada ruangnya sebagai bawahan. Padahal sosok aparat desa sebenarnya merupakan sosok *tau nirannuang*, hanya saja mereka masih belum memahami bahwa mereka adalah sosok *tau nirannuang* oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebab mereka merupakan kaki tangan berjalannya program kegiatan.

Unsur *Tau Anrannuang* dalam hal ini merupakan sosok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada pemerintah baik itu aparat maupun pemimpin utama. Dalam penyusunan alokasi dana desa, masyarakat merupakan salah satu

bagian terpenting demi kelancaran kegiatan. Konteks *tau anrannuang* dalam hal salah satu sosok yang memberikan kontribusi besar dalam penyusunan alokasi dana desa, sebab mereka merupakan objek dan atau subjek dalam penggunaan dana desa yang paham akan kondisi yang mereka butuhkan demi pembangunan desa sesuai dengan pernyataan berikut ini:

“Nah justru partisipasi masyarakat disinilah yang memiliki peranan penting dalam Alokasi Dana Desa, sekitar 40 orang masyarakat datang dan memberikan aspirasi pada setiap pertemuan. Beberapa aspirasi masyarakat ditampung dan yang dianggap sejalan dengan tujuan pemerintah akan dijalankan”. (Hasil wawancara Dengan Sekretaris Desa Cakura, 27 September 2017).

Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa masyarakat sebagai sosok *tau anrannuang* memiliki peranan besar dalam penyusunan alokasi dana desa, oleh sebabnya, mereka diberi ruang yang besar untuk mengaspisasikan kebutuhan dan segala aspirasinya, seperti pernyataan berikut ini :

“Kita berikan ruang untuk mengaspisasikan pendapatnya, kita rampung, dan kita tetapkan mana yang jadi prioritas bersama sehingga tidak ada jeda antara kepala desa dan masyarakat. Berlaku jujur dan amanah kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Sesuai pernyataan-pernyataan di atas, maka unsur *tau anrannuang* merupakan unsur penting dalam penyusunan alokasi dana desa, yang mana dengan mengaspisasikan segala kebutuhan pembangunan daerah masing-masing dalam musyawarah, maka sosok pengambil keputusan akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Hingga pelaksanaan alokasi dana desa berjalan sesuai dengan skala yang diprioritaskan. Hal tersebut dengan adanya nilai pokok kesetaraan dalam mengemukakan aspirasi dalam musyawarah / rapat penyusunan alokasi dana desa

dan pembangunan desa, maka dalam pengelolaan ADD, program yang dirangkaikan dengan dana dari pusat itu mengarah kepada program yang bisa membangun masyarakat secara luas. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan yang dikemukakan oleh ketua BPD berikut :

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil musyawarah kami menetapkan bahwa ADD diperuntukkan ke dalam 3 program yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor, kegiatan operasional kelembagaan desa. dan untuk pemberdayaan sendiri dialihkan ke DD (dana desa). Dalam musyawarah tersebut, aparat desa menanggapi dengan baik dan kami merapatkan program-program tersebut hingga beberapa diantaranya dijadikan sebagai program pembangunan dan saat ini telah direalisasikan program pembangunan tahap pertama sebesar 70%, dan sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Bisa dibilang 50% telah real secara fisik”. (Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, nampak unsur *tau anrannuang* mengarah pada aspirasi (harapan) masyarakat dalam penyusunan ADD dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak aparat terhadap desa dan masyarakat di dalamnya. sehingga dengan adanya unsur ini, masyarakat dan lingkungan akan berjalan beriringan menuju pembangunan desa sesuai tujuan kebijakan ADD.

Unsur *Appakarannu-rannu* dengan definisi sebagai sesuatu yang menyenangkan hati, tidak semata memberikan harapan-harapan palsu. Melalui unsur ini, justru memberikan ruang kepada pelaku pemerintahan untuk dinamis dan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat. *Appakarannu-rannu* dalam penyusunan alokasi dana desa terletak pada penarikan kesimpulan hasil musyawarah. Dalam hal ini, unsur *appakarannu-rannu* terletak pada program-program yang disepakati sesuai dengan skala prioritas demi pembangunan desa. Demikian akan terlahir pergerakan yang dinamis aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Unsur dinamis

tersebut akan menghindarkan aparaturnya dari sifat sekedar menyenangkan hati, namun pelaksanaan program alokasi dana desa tidak dilakukan sesuai dengan semestinya, maka di sinilah peranan unsur *appakarannu-rannu* sesuai dengan pernyataan berikut:

“Nah itu dia. Untuk kepentingan politik banyak orang yang melakukan seperti itu (memberikan harapan palsu), tapi kalau kita mau konsisten, dan pemimpin yang sejati apapun kata mereka kebenaran harus ditegakkan. Saya selalu katakan : apapun resikonya!! karena pemimpin itu harus siap menanggung resiko”. (Hasil wawancara dengan kepala desa cakura, 29 September 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, dinyatakan bahwa untuk menghindari sikap sekedar memberikan harapan kepada masyarakat dan menghancurkan kepercayaan serta harapan masyarakat terkait dana yang seharusnya memberikan manfaat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka sikap konsisten harus ditegakkan menuju watak dinamis. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan berikut:

“*Appakarannu-rannu*, itu merupakan salah satu bagian dari panrannuangku yang memiliki tujuan menyenangkan hati, untuk menghibur dengan memberikan sesuatu yang memang diharapkan oleh orang lain”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cakura, 28 September 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur *appakarannu-rannu* memancing sikap dinamis aparaturnya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan musyawarah untuk memberikan sesuatu yang memang diharapkan oleh orang lain dalam hal ini adalah masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan alokasi dana desa ditunjang konteks *appakarannu-rannu* untuk memenuhi harapan masyarakat.

Unsur *Assamaturu*, selanjutnya pada unsur ini konteks musyawarah dan mufakat merupakan unsur inti dari penyusunan alokasi dana desa. Melalui musyawarah, berembuk dan duduk bersama menghasilkan beberapa kesepakatan

demokrasi terciptanya demokrasi sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Penyusunan alokasi dana desa dilakukan dalam musyawarah dengan beberapa anggota masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa tokoh pemuda asli wilayah setempat. Melalui rapat kerja pembangunan desa, musyawarah terkait program-program alokasi dana desa dilakukan dengan menampung beberapa aspirasi dari anggota rapat. Menarik kesimpulan berdasarkan prioritas pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. sesuai dengan pernyataan berikut:

“Saya selaku kepala BPD merampung segala harapan masyarakat sekitar dan menuangkannya dalam rapat maupun musyawarah. Misalnya, usulan tentang adanya pembentukan jalan tani, diadakannya MCK, pembentukan jalan kuburan, dan Talud pada jalan, jalan kampung untuk penduduk, semua itu merupakan rampungan dari semua keluhan dan harapan masyarakat sekitar kepada kami”. (Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat turut serta dalam rapat atau musyawarah tetapi segala keluhan dan harapan mereka dituangkan oleh ketua BPD selaku perwakilan dari suara masyarakat setempat. Hal tersebut ditunjang oleh pernyataan berikut :

“Dalam rapat RKPD semua berhak dan sama semua haknya untuk mengusulkan program yang mau dilaksanakan di dusun masing-masing, nanti diputuskan oleh forum rapat itu yang kemudian disetujui oleh kepala desa dan BPD. Masyarakat di desa ini sendiri sangat berpartisipasi dalam setiap rapat, karenanya tugas kami aparat pemerintah untuk merampung semuanya menuju pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka disimpulkan bahwa penyusunan alokasi dana desa dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam RKPD. Meski beberapa

aspirasi diungkap melalui perantara, namun harapan masyarakat tetap dirembukkan dan dipertimbangkan sesuai skala prioritas untuk dilaksanakan dalam program.

Unsur *pappasang*, menjadi salah satu aspek yang membentuk falsafah *Panrannuangku* menjadi satu batang kesatuan. Terdiri atas nilai-nilai moral dalam pesan, petuah dan amanah, unsur ini memberikan peran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Melalui unsur ini, penyusunan alokasi dana desa mengarah pada aspek islami. Dalam penyusunan alokasi dana desa, unsur ini berada pada posisi penyampaian aspirasi masyarakat yang diamanahkan dalam rapat serta pada eksekusi hasil rapat seperti pada pernyataan berikut ini :

“Saya selaku kepala desa yang diberikan amanah, selalu terbuka kepada masyarakat dan menerima setiap keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturannya termasuk ketika mereka mengaspisasikan idenya dalam penyusunan alokasi dana desa”. (Hasil wawancara dengan Kepala desa Cakura, 29 September 2017).

Menerima setiap keluhan masyarakat juga segala aspirasi pada saat musyawarah, membantu penyusunan alokasi agar tertata sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran transdental seperti diatas didukung oleh pernyataan berikut:

“*Tanggungjawab/amanah*, ini yang paling penting karena pertanggungjawabannya sampai ke akhirat”. (wawancara dengan Sekretaris Desa Cakura, 29 September 2017).

Kesadaran spiritual seperti demikian merupakan dasar bagi seluruh kagiatan manusiawi. Memelihara titipan berupa dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan titipan harapan dari masyarakat lewat program-program yang diaspirasikan dalam rapat merupakan perkara yang tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya akhir-akhir ini tindak penyelewengan dana terlalu marak terjadi sehingga

perlu unsur yang mengandung nilai islami dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk bisa dipertanggungjawabkan *Habblumminallah wa habblumminannas*. Adapun unsur terakhir yaitu salah satu unsur yang mendukung segala unsur dalam falsafah *Panrannuangku*.

Unsur terakhir dalam falsafah *panrannuangku* yang menjadi kaki tangan lima unsur lainnya adalah **unsur *kacaraddekang***. Unsur yang berarti kepintaran, kecerdasan atau keahlian tersebut mampu mengendalikan beberapa unsur sebelumnya. Nilai dalam unsur ini mencakup nilai kecerdasan intelektual yang mengarahkan seseorang pada kecerdasan pengetahuan, selanjutnya kecerdasan emosional yang merupakan kecerdasan seseorang mengatur atau mengontrol emosi dalam beraktifitas dan kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual. Dalam penyusunan alokasi dana desa, unsur ini memiliki peranan penting demi berjalannya program dan pembangunan desa. Untuk mengarah pada penempatannya dalam penyusunan alokasi dana desa, maka berikut pernyataan yang sesuai dengan hal tersebut :

“Kacara’dekang, bagaimana pintar-pintarnya aparat mengelola semua aspirasi yang masuk sehingga memberikan kesan yang baik”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cakura, 28 September 2017).

Pernyataan demikian sejalan dengan pernyataan berikut terkait unsur *kacara’dekang* dalam penyusunan alokasi dana desa :

Pertama adalah intelektual, yang kedua adalah agamanya, tidak bisa tidak yang itu antara intelektual dan agama, harus seimbang karena kecerdasan spiritual dan intelektual untuk bisa mengkoordinir segala perbuatan kita. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017)

Pernyataan demikian memberikan gambaran bahwa penyusunan program dana desa maupun alokasi dana desa dibutuhkan kecerdasan intelektual agar segalanya berjalan sesuai tujuan dan harapan. Tidak dipungkiri bahwa, kecerdasan spiritual memberikan peranan terhadap kecerdasan emosional yang mampu mengendalikan kecerdasan intelektual seseorang. Oleh karena itu, kecerdasan sangat dibutuhkan dalam penyusunan alokasi dana desa maupun pengelolaan dana desa menuju pembangunan desa yang efisien dan bertanggungjawab.



2. Pembahasan

a. Nilai Kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura Ditinjau dari *Expectancy Theory*

Expectancy Theory yang merupakan teori harapan yang dipelopori oleh V-Room dengan asumsi bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik hasil kepada individu. Terdapat tiga asumsi pokok Vroom dalam teori harapan. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (*outcome expectancy*) sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut.
2. Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi (*valence*) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan.
3. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (*Effort Expectancy*) sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik

antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Hal tersebut sesuai dengan makna falsafah *panrannuangku* yang dinyatakan oleh kepala desa bahwa pencapaian tujuan dengan peranan harapan yang timbal balik (*feedback*) di dalamnya akan berhasil. Hal tersebut didukung oleh teori steward dengan asumsi bahwa dengan mengintegrasikan urusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya dalam hal ini akan timbul *feedback*. Sehingga *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan organisasi dan pihak prinsipal (Raharjo, 2007).

Teori harapan berkata apabila seseorang memiliki keinginan untuk menghasilkan sesuatu pada waktu tertentu tergantung pada tujuan khusus orang yang bersangkutan dan pada persepsi orang tersebut tentang nilai suatu prestasi. Model ekspektasi mendefinisikan bahwa motivasi adalah hasil dari seberapa besar hasrat seseorang terhadap sesuatu dan seberapa besar kemungkinannya dia akan berhasil memperoleh keinginan itu. Adapun daya tarik teori harapan ini dalam empat hal :

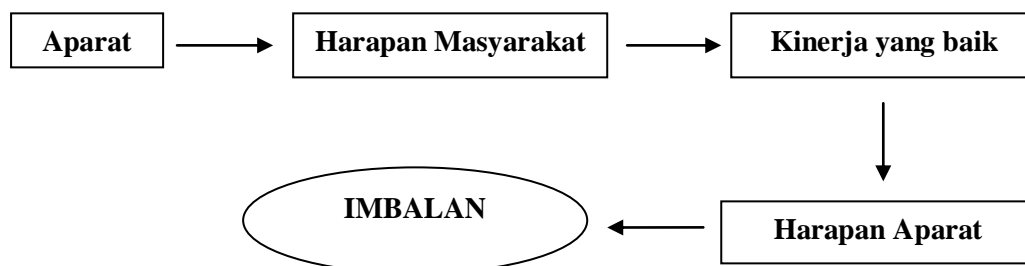
1. Teori ini menekankan imbalan. Menurut teori ini terdapat keyakinan bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi sejajar dengan apa yang diinginkan oleh pekerja.
2. Para manajer harus memperhitungkan daya tarik imbalan yang memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai apa yang diberikan oleh pekerja pada imbalan yang diterimanya.

3. Teori ini menekankan perilaku yang diharapkan dari para pekerja. Artinya menekankan pentingnya keyakinan dalam diri pekerja tentang apa yang diharapkan perusahaan dari dirinya dan bahwa prestasi kerjanya dinilai.
4. Teori ini menyangkut harapan yaitu tidak menekankan apa yang realistik dan rasional namun yang ditekankan adalah harapan pekerja mengenai prestasi kerja, imbalan dan hasil pemuasan tujuan individu akan menentukan tingkat usahanya bukan hasil itu sendiri.

Daya tarik teori harapan (*expectancy theory*) dalam pemaknaan falsafah *panrannuangku* tidak jauh berbeda. Daya daya tarik yang secara garis besar menekankan pada imbalan itu, dalam falsafah *panrannuangku* dapat dimaknai sebagai hubungan timbal-balik (*feedback*) masyarakat dan kinerja aparat pemerintah. Seorang aparat akan melakukan tugasnya dengan baik ketika ada harapan bahwa akan mendapat imbalan yang sesuai kinerja yang diberikan. Sedangkan hasil kinerja yang mereka lakukan terbilang berhasil ketika aparat tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa setempat.

Jadi aparat akan memperoleh apa yang diharapkan, ketika berhasil telah memenuhi tugasnya sebagai aparat yang melayani masyarakat. Maka nilai falsafah *Panrannuangku* berdasarkan hasil penelitian dapat tergambar pada bagan berikut :

Gambar 4.6
Nilai Falsafah Panrannuangku Ditinjau dari Expectancy Theory



Harapan masyarakat dalam bagan akan mempengaruhi hasil kinerja aparat, sebab aparat harus memenuhi harapan masyarakat. Berarti pemenuhan harapan masyarakat akan memenuhi kriteria kinerja baik, sedangkan kinerja yang baik didorong oleh faktor harapan aparat yang berupa imbalan. Demikian nilai *panrannuangku* ditinjau dari *expectancy theory*.

b. Penempatan Unsur-Unsur Pokok Kearifan “Panrannuangku” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardesa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Adapun tahapan/mechanisme perencanaan Alokasi Dana Desa ada dua tahap yaitu pra-musyawarah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, berbeda lagi dengan tahapan pencairan dan tahapan penggunaan dana/anggaran. Namun pada pemerintahan desa Cakura, mekanisme penyusunan alokasi dana desa terbagi atas beberapa langkah/step, sesuai dengan pernyataan berikut :

“Mekanisme penyusunan alokasi dana desa itu, pertama-tama kami lakukan rapat kerja pembangunan desa (RKPD) dan menampung segala aspirasi masyarakat. Setelah itu diputuskanlah program-program yang bisa dikerjakan. Jadi kita itu sudah Rapat Kerja Pembangunan Desa sebelum dana itu turun, setelah dana turun maka kita putuskan kembali apa yang harus kita kerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Jadi RKPD bisa 10 program, tapi kita harus perhatikan dua hal yaitu skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia. Itu semua yang dibuatkan semua laporannya ke BPMD untuk dibuatkan RAB nya baru kita kerja, jadi

selesai semua RABnya secara administrasi, dana cair baru kita kerjakan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017).

Pengelolaan keuangan ADD harus sesuai dengan APBDes karena ADD merupakan bagian dari komponen APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD sebagai berikut :

- a) Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat.
- b) Partisipasi, dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan APBDes.
- c) Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan.
- d) Akuntabilitas yaitu pemerintah desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Terkait akuntabilitas dan transparansi, maka untuk menghindari praktik kecurangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, maka pihak pemerintah aparat desa dituntut untuk melakukan transparansi. Desa Cakura, salah satu dari puluhan desa di Takalar yang saat ini tengah melakukan transparansi sesuai dengan pernyataan berikut :

“Untuk menghindari asumsi bahwa dana desa itu bisa diakali, penggunaan dana desa semua itu kami lakukan dengan transparans. Jadi kami lebih mengutamakan transparansi, secara administrasi kami memasang baliho penggunaan rincian dana. Kemudian secara fisik kami membangun

sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat dan alam sekitarnya”.
(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Sesuai pernyataan diatas, sikap transparansi aparat pemerintah desa dalam pengalokasian dana APBDes dilakukan dengan menggunakan beberapa baliho sebagai sikap transparansi administrasi dengan rincian anggaran dari hasil musyawarah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi APBDes Cakura

APBDes Cakura			
Pendapatan	Rp 1.295.657.000	ADD	Rp 390.599.000
Dana Desa	Rp 817.153.000	BHPRD	Rp 52.080.000
SilPA		Rp 35.825.000	

Berdasarkan tabel alokasi APBDes, dapat disimpulkan bahwa dana yang diterima oleh pemerintah desa Cakura ialah 1.295.657.000 Rupiah dan terdiri dari 4 pengalokasian, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA). Dari tabel dapat terlihat bahwa pengalokasian dana ke program Dana Desa jauh lebih besar dibanding dengan program Alokasi Dana Desa itu sendiri.

Tabel 4.4
Rincian Alokasi APBDes Cakura

Belanja	Jumlah	Alokasi
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 413.774.600	
A. Penghasilan Tetap dan Tunjangan		

- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Rp 200.400.000	ADD
- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	Rp 42.000.000	BHPRD
- Tunjangan BPD dan anggotanya	Rp 46.800.000	ADD
- Tunjangan ptpkd dan pemeriksa barang	Rp 43.200.000	ADD
B. Kegiatan operasional kantor		
- Belanja barang dan jasa	Rp 13.146.600	ADD/BHPRD
- Belanja modal	Rp 35.825.000	SilPA 2016
C. Kegiatan operasional kelembagaan desa	Rp 32.400.000	ADD
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 796.882.400	
- Pembangunan talud Dusun Cakura	Rp 42.600.000	DD
- Pemadatan jalan tani Dusun Buakanga	Rp 65.900.000	DD
- Pemadatan jalan tani dan plat decker Dusun Je'nelimbua'	Rp 93.600.000	DD
- Pemadatan jalan tani Dusun Pangkaje'ne, 500M	Rp 78.750.000	DD
- Pemadatan jalan tani Dusun Bontomaka', 650M	Rp 109.900.000	DD
- Perintisan jalan perkampungan Dusun Bontocamba, 290M	Rp 116.700.000	DD
- Pemadatan jalan pekuburan Dusun Je'nelimbua, 115M	Rp 21.950.000	DD
- Pembangunan gedung BPD Desa Cakura	Rp 62.729.400	DD
- Pembangunan MCK, 10 Unit	Rp 111.700.000	DD

- Pembangunan Balai Pelatihan Desa Cakura	Rp 91.053.000	DD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 35.000.000	
- Pelatihan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 10.000.000	DD
- Bimtek Siskeucles	Rp 5.000.000	DD
- Bimtek kader teknis	Rp 5.000.000	DD
- Honor tim pengelola keuangan	Rp 15.000.000	DD
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000	
- Penyertaan modal Bumdes	Rp 50.000.000	DD

Rincian penggunaan dana ADD pada beberapa desa digunakan untuk kegiatan operasional kantor, gaji/tunjangan aparat, serta pembangunan desa itu sendiri. Berbeda halnya dengan pengalokasian APBDes Cakura, berdasarkan penjelasan Tabel 4.4 Rincian Alokasi APBDes Cakura hasil musyawarah dalam rapat kerja pembangunan desa memutuskan untuk mengalokasikan ADD hanya ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 413.774.600 yang selanjutnya terbagi atas tiga garis besar pengalokasian. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 35.000.000, pembangunan desa sebesar Rp 796.882.400 serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000 dimasukkan ke dalam program pendanaan dana desa.

Pemisahan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kapasitas kinerja aparatur. Wahyudi dalam Kamaruddin (2017) menyatakan bahwa tidak manusiawi jika staf hanya digaji 500-600 ribu rupiah padahal aparat desa bekerja tidak

mengenal waktu dan kepala desa pun bekerja berat tanpa mengenal waktu dan tepat. Beranjak dari hal tersebut maka anggaran dan program ADD sebatas pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk mengelola bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan pengeluaran pembiayaan. Adapun pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan penganggaran Dana Desa, dilakukan secara bertahap demikian pula dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut rencana anggaran yang dilakukan bertahap oleh pemerintah Desa Cakura :

Tabel 4.5
Rencana Anggaran Dana Desa Cakura Tahap 1 60%

NO.	URAIAN	VOLUME	JUMLAH
I.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp 455.291.800
1.	Pembangunan Talud Dusun Cakura	220 M	Rp 42.600.000
2.	Pemadatan Jalan Tadi Dusun Buakanga	500 M	Rp 65.900.000
3.	Pemadatan Jalan Tani Dan Plat Decker Dusun Je'nelimbua'	500 M	Rp 93.600.000
4.	Perintisan Jalan Perkampungan Dusun Bontocamba	290 M	Rp 116.700.000
5.	Pembangunan Balai Pelatihan Dan Pendidikan	1 unit	Rp 91.053.000
6.	Pemedatan Jalan Tani Dusun Bontomaka'	650 m	Rp 45.438.800
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 15.000.000
1.	Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 Paket	Rp 10.000.000

2.	Bimtek Kader Teknis	1 Paket	Rp 5.000.000
III.	Pembiayaan		Rp 20.000.000
	Penyertaan Modal Desa		Rp 20.000.000
	Jumlah Total		Rp 490.291.800

Berdasarkan tabel diatas, pengalokasian dana desa (DD) ke dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahap I (Pertama) sebesar Rp 455.291.800 dengan 6 program pembangunan. Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dana yang dialokasikan sebesar Rp 15.000.000 untuk 2 program kegiatan dan untuk penyertaan modal itu sendiri dialokasikan dana sebesar Rp 20.000.000. Maka Tahap I (Pertama) dana yang digunakan sebesar Rp 490.291.800.

Adapun Tahap pertama penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hampir berada pada tahap akhir penyelesaian. Seperti pernyataan kesaksian ketua BPD berikut ini :

“Pada program pembangunan desa saat ini telah direalisasikan program pembangunan tahap pertama sebesar 70%, dan sisanya masih dalam tahap penyelesaian”. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Pelaksanaan secara bertahap tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas tindak manipulasi atau tindakan fiktif penggunaan anggaran. Sementara itu, pemerintah Desa Cakura tengah bersiap untuk memasuki tahap kedua pengelolaan dana desa tersebut dengan rencana anggaran biaya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rencana Anggaran Dana Desa Cakura Tahap II 40%

NO.	URAIAN	VOLUME	JUMLAH
I.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp 276.862.200
1.	Pemadatan Jalan Pekuburan Dusun Je'nelimbua'	115 M	Rp 21.950.000
2.	Pemedatan Jalan Tani Dusun Pangkaje'ne	650 M	Rp 78.750.000
3.	Pembangunan MCK	10 Unit	Rp 111.700.000
4.	Pemadatan Jalan Tani Dusun Bontomaka'	650 M	Rp 64.461.200
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 20.000.000
1	Bimtek siskeudes	1 Paket	Rp 5.000.000
2	Honor TPK	1 Paket	15.000.000
III.	Pembiayaan		Rp 30.000.000
1	Penyertaan Modal Desa		Rp 30.000.000
	Jumlah Total		Rp 326.861.200

Berdasarkan tabel diatas, pengalokasian dana desa (DD) ke dalam pelaksanaan pembangunan desa tahap (Kedua) sebesar Rp 276.862.200 dengan 4 program pembangunan. Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dana yang dialokasikan sebesar Rp 20.000.000 untuk 2 program kegiatan dan untuk penyertaan modal itu sendiri dialokasikan dana sebesar Rp 30.000.000. Maka Tahap II (Kedua) dana yang digunakan sebesar Rp 326.861.200. Adapun Tahap Kedua penggunaan

anggaran dan pelaksanaan kegiatan ini sementara dalam proses sementara tahap pertama diselesaikan.

Tabel 4.7
Rencana Alokasi Dana Desa Cakura

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cakura	
a.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	Rp 290.400.000
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Rp 200.400.000
2.	Tunjangan Bpd Dan Anggotanya	Rp 46.800.000
3.	Tunjangan Ptkpd Dan Pemeriksa Barang	Rp 43.200.000
b.	Kegiatan Operasional Kantor	Rp 13.146.600
1.	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 13.146.600
c.	Kegiatan Operasional Kelembagaan Desa	Rp 32.400.000
	Total	Rp 335.946.600

Berdasarkan tabel diatas rincian pengalokasian dana ADD diperuntukkan ke dalam tiga aspek, yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor, dan kegiatan operasional kelembagaan desa. Adapun penghasilan tetap dan tunjangan dialokasikan sebesar Rp 290.400.000 yang dibagi pada tiga pembagian. Selanjutnya untuk kegiatan operasional kantor, dialokasikan dana sebesar Rp 13.146.600 untuk keperluan belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk kelembagaan desa itu sendiri, dialokasikan dana sebesar Rp 32.400.000 sehingga dana yang

dianggarkan pada ADD ini sebesar Rp 335.946.600. Meski hanya berfokus pada operasional kantor dan tunjangan aparat, namun ini merupakan hasil musyawarah bersama dan menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Penempatan unsur-unsur falsafah *Panrannuangku* hampir sama secara keseluruhan dalam penyusunan alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan penyusunan merupakan hal mendasar dalam pengelolaan dana yang diamanahkan. Selain itu, unsur-unsur falsafah *Panrannuangku* juga mengandung nilai yang mendasar bagi pengelolaan dan hal mendasar pula dalam kinerja pengelolaan dana desa. Selanjutnya implementasi nilai-nilai dalam unsur falsafah tersebut sebagian besar telah dipahami peranannya oleh aparat pemerintah maupun masyarakat, sesuai dengan pernyataan berikut ini :

“Panrannuangku itu kan asal katanya harapanku, sehingga inilah barangkali mendasari kita secara umum dalam melaksanakan pemerintahan atau kegiatan apapun kita selalu melibatkan masyarakat. jadi ada feedbacknya antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi pemerintah menaruh harapannya kepada masyarakat sementara masyarakat juga menaruh harapannya kepada pemerintahnya. Jadi ada hubungan timbal balik di sini”. (Hasil wawancara dengan kepala desa Cakura, 29 September 2017).

Sesuai pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemahaman tentang peran nilai dalam unsur-unsur falsafah yang sebenarnya, akan membawa pada hal yang baik. Selain pemahaman akan peran nilai yang terkandung, maka pengimplementasiannya akan menghasilkan sesuatu yang baik pada masa yang akan datang. Dijadikan sebagai landasan utama dan merupakan pondasi dalam

penyusunan Alokasi Dana Desa maupun APBDes, maka makna “harapan” akan benar-benar tercapai sesuai fitrahnya.

Konteks *tau nirannuang* dalam penyusunan alokasi dana desa didefinisikan sebagai seorang kepala desa dan aparat pemerintah, selaku penggerak program dan pengambil keputusan hasil musyawarah dalam rapat. Mengemban amanah dan tanggungjawab penuh terhadap kemakmuran masyarakat setempat atas keputusan yang ditetapkan, menjadi tekanan tersendiri bagi mereka yang termasuk ke dalam konteks *tau nirannuang*. Hal tersebut karena pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu kesadaran yang menyangkut individu dan sosial. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri ada hal yang dipertimbangkan di dalamnya, yaitu keuntungan dan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Seperti dalam peribahasa Makassar oleh Zainuddin (1995: 84) berikut:

“*Ia butta ia langi*”

Terjemahnya :

Ia bumi dan ia langit.

Mengandung makna tumpuan harapan banyak orang berarti sosok seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat. Unsur *tau nirannuang* pada konteks pengambilan keputusan dalam penyusunan Alokasi Dana Desa sesuai dengan pemahaman informan, mengandung nilai kejujuran, tanggungjawab, dan konsistensi. Sehingga dalam penerapannya akan menghasilkan keputusan yang sesuai harapan masyarakat. Gambaran terkait hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa pepatah yang terkandung dalam pernyataan berikut ini :

“Pemerintah itu siapapun dia, harus berkata jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatannya *“Punna le’leng, le’leng tommo”* (kalau hitam, dimana pun itu tetap hitam), itu yang harus kita lakukan. Jangan berubah karena sesuatu, sebab kepercayaan seseorang tidak bisa diukur karena terkadang *“tawwa sikalia tappa”* (orang hanya sekali percaya) oleh sebab itu kepercayaan diemban dengan baik. Nah itu kepala desa yang tidak bisa *dirannuang*, karena mengkhianati *panrannuang* rakyat. Kepala desa itu bukan *panrannuangna* si A si B, tapi *panrannuangna tau jaia*. Karena kita ini ada aturan negara yang mengatur”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017).

Makna *“Punna le’leng, le’leng tommo”* (kalau hitam, dimana pun itu tetap hitam) menyiratkan nilai kejujuran dan konsistensi terhadap keputusan yang telah diambil. Kemudian makna *“tawwa sikalia tappa”* (orang hanya sekali percaya) menyiratkan bahwa kepercayaan masyarakat berawal dari kejujuran dan konsistensi *tau nirannuang* tersebut. Selanjutnya makna *“panrannuangna tau jaia”* (harapan orang banyak) menyiratkan bahwa pentingnya kejujuran, konsistensi, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan penyusunan alokasi dana desa merupakan harapan orang banyak yang akan hancur ketika dikhianati seperti dalam peribahasa yang dipahami oleh kepala desa Cakura berikut ini :

“Ribangngia lagi na tatassela’ matangku apalagi ri alloa ampikkiri katallassangna tau jaia”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017).

Terjemahnya :

Semalam saja matakku tidak bisa terlelap, apalagi di siang hari memikirkan kehidupan orang banyak).

Istilah yang dipahami tersebut senada dengan makna dalam kelong sastra Makassar oleh Baso (2017) yang mengukung erat budaya *siri’ na pacce* khas Sulawesi Selatan berikut :

“Manna tinggi kalukua natinggiang layang-layang kuambi’tonji punna siri’ latappela”

Terjemahnya :

Meski pohon kelapa lebih tinggi dari layang-layang, akan tetap kupanjat jika malu yang dipertaruhkan.

Perpaduan makna dari peribahasa yang dipahami oleh kepala desa dan istilah sastra makassar menyiratkan bahwa seorang pemimpin harus menggenggam erat nilai profesionalisme dan tanggungjawab dalam kinerjanya karena terkait dengan *siri’ na pacce* terhadap harapan orang banyak dan terhadap negara.

Berarti sebagai tumpuan masyarakat, konteks *tau nirannuang* dalam pengambilan keputusan pada musyawarah atau penyusunan Alokasi Dana Desa akan memberikan ruang untuk aparat dan kepala desa berlaku lebih amanah sesuai dengan pernyataan berikut :

“Secara pribadi, penggunaan dana desa, kepala desa dalam hal ini merupakan penanggungjawab mutlak dan pengguna anggaran yang tidak bisa dipihakketigakan sampai hari ini. Jadi, kalau ada kepala desa yang pihakketigakan kegiatan pembangunan desa maka siap-siap saja diperiksa!”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Melalui pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa konteks *Tau nirannuang* (kepala desa) dalam penyusunan alokasi dana desa, merupakan penanggungjawab mutlak dan pengguna anggaran yang tidak memihak ketigakan kegiatan (alokasi dana desa). Mutlak memprioritaskan kegiatan diatas skala prioritas pembangunan desa, sehingga dalam penyusunan alokasi dana desa ADD akan sesuai dengan apa yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Konteks *tau anrannuang* dalam penyusunan alokasi dana desa yang dimaksud ialah bagaimana kontribusi masyarakat yang diaspirasikan mereka pada

saat musyawarah atau rapat kerja. Dalam unsur ini terkandung nilai amanah bagi aparat pemeritah dan sikap terbuka, konteks tau anrannuang tersebut dapat tergambar dalam pernyataan berikut :

“I nai lampakabajiki pa’rasanganga punna tiai para-para ikatte, punna tiai iya ngaseng anjo mae aparaka”. (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Cakura, 01 Oktober 2017).

Terjemahnya :

Siapa yang akan memperbaiki negeri ini jika bukan kita semua, jika bukan mereka para aparat negara.

Makna dalam pernyataan di atas ialah selain berharap kepada diri sendiri, masyarakat selaku *tau anrannuang* juga menyelipkan harapannya kepada aparat pemerintah agar mereka turut menjaga negeri bersama dengan mereka. Namun dalam konteks penyusunan alokasi dana desa, bahasa di atas dimaksudkan agar aparat menerima aspirasi masyarakat sebagai kontribusi terhadap negara/wilayah. Nilai yang terkandung dalam unsur adalah nilai tanggung jawab. Pernyataan di atas senada dengan sastra lisan Makassar (kelong *pappasang*) oleh Baso (2017) yang berbunyi :

“Kayu lombo bulelengi ma’rampang kajilijili tana assenna kalenna nipa’lalangngi”

Terjemahnya :

Pohon besar dan berguna merambat kemana-kemana, tak tahu diri bahwa dirinyalah tempat bernaung.

Makna pernyataan dan makna dalam kelong *pappasang* di atas merupakan satu kesatuan. Dalam kelong tersirat perumpamaan pohon sebagai seorang pemimpin, seseorang yang diharapkan yang harus tahu posisinya sebagai tempat bernaung masyarakat. Oleh karena itu, harapan *tau anrannuang* semestinya menjadi tanggungjawabnya secara utuh.

Memiliki nilai pokok kesetaraan dalam mengemukakan aspirasi dalam musyawarah / rapat penyusunan alokasi dana desa dan pembangunan desa, maka unsur ini mengandung makna harapan masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan ADD, program yang dirangkaikan dengan dana dari pusat itu mengarah kepada program yang bisa membangun masyarakat secara luas. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan yang dikemukakan oleh ketua BPD berikut :

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil musyawarah kami menetapkan bahwa ADD diperuntukkan ke dalam 3 program yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor, kegiatan operasional kelembagaan desa. dan untuk pemberdayaan sendiri dialihkan ke DD (dana desa). Dalam musyawarah tersebut, aparatur desa menanggapi dengan baik dan kami merapatkan program-program tersebut hingga beberapa diantaranya dijadikan sebagai program pembangunan dan saat ini telah direalisasikan program pembangunan tahap pertama sebesar 70%, dan sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Bisa dibilang 50% telah real secara fisik”. (Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, nampak unsur *tau anrannuang* dalam penyusunan ADD sepakat mengalokasikan ADD ke dalam bidang operasional pemerintahan desa untuk memotivasi aparat demi pembangunan desa. Ada harapan masyarakat dalam kesepakatan tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban aparat terhadap desa dan masyarakat terdapat pada pengalokasian Dana Desa khusus pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga dengan adanya unsur ini, masyarakat dan lingkungan akan berjalan beriringan menuju pembangunan desa sesuai dengan tujuan ADD.

Konteks *appakarannu-rannu* selanjutnya dalam penyusunan alokasi dana desa diperuntukan agar aparat tidak sekedar memberi harapan palsu terhadap aspirasi

masyarakat. Tetapi konsisten dengan apa yang disepakati bersama. Sesuai dengan peribahasa dalam pernyataan berikut :

“Apapun resikonya!! karena pemimpin itu harus siap menanggung resiko *punna tau lammiri’ anrai’ anginga anrai’ tongi, ammiri’ kalau’ anginga kalu’ tongi*, itu tidak bisa *matei ra’yaka* (kalau orang yang ikut arah mata angin, jika angin berhembus ke Timur ia ikut ke timur, jika angin berhembus ke barat ia ikut ke barat itu tidak bisa, rakyat bisa mati ditangannya)”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 29 September 2017).

Peribahasa dalam pernyataan tersebut memiliki makna agar aparaturnya harus konsisten dalam mengambil suatu keputusan, sehingga tidak sekedar memberi harapan sementara kepada masyarakat. Akan tetapi bergerak sesuai dengan harapan masyarakat yang diaspirasikan dalam penyusunan alokasi dana desa. Sehingga proses pertanggungjawaban secara fisik maupun non-fisik terealisasi sebagaimana mestinya. Konteksnya, unsur ini mengandung nilai profesionalisme pengambilan keputusan yang didalamnya terdiri atas nilai kejujuran, konsistensi dan tanggungjawab supaya tidak mengkhianati harapan masyarakat. Seperti dalam sastra lisan Makassar (kelong *pappasang*) oleh Baso (2017) berikut:

“Mannabaji’ passarea alusu’ passidakkaya bajikangngangtonji pakmaek tamaminraya”

Terjemahnya :

Sebaik-baik pemberian, seikhlas-ikhlas sedekah, tetap lebih baik akhlak yang tidak berubah.

Kelong *pappasang* diatas menyiratkan makna agar tetap konsisten sebagaimana mestinya, sebab konsisten terhadap satu hal (kebaikan) bahkan jauh lebih baik dari ikhlasnya bersedekah dan sebaiknya pemberian. Demikian sikap yang harus ditanamkan aparaturnya dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

Sebagai dasar pengambilan keputusan atas hasil musyawarah terkait penyusunan ADD, unsur ini menciptakan nilai konsistensi aparat Desa. Bergerak sesuai program yang telah dibahas dalam kesepakatan bersama, akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Sesuai dengan hasil musyawarah berarti sesuai dengan harapan masyarakat dan keputusan bersama yang tidak boleh dikhianati. Maka pada pengelolaannya, aparat harus konsisten dan tidak sekedar mengiyakan aspirasi masyarakat tetapi melaksanakan program sesuai dengan hasil musyawarah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan berikut :

“Kami harapannya agar pemerintah dan aparat pemerintah desa tidak sekedar menyenangkan hati dengan menjanjikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka perlu bimbingan teknis (Bimtek). Supaya pemahaman akan pelayanan kepada masyarakat itu bisa terlaksana bagus, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki seorang aparat sehingga dalam melayani masyarakat tidak seenaknya, karena tahu akan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan adanya bimbingan teknis itu”. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, unsur *Appakarannu-rannu* pada pengelolaan ADD menuntut aparat konsisten dan bersikap dinamis sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan desa. Adanya harapan masyarakat dalam kesepakatan program ADD yang hanya fokus pada bidang operasional pemerintahan desa, maka bentuk pertanggungjawaban aparat terhadap desa dan masyarakat terletak pada pengalokasian Dana Desa khusus pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dengan konsisten atas pembangunannya.

Selanjutnya **konteks *assamaturu*** dalam penyusunan alokasi dana desa terdapat pada musyawarah penyusunan alokasi dana desa. Dimaksudkan bahwa interaksi antara aparat, sejarannya, kepala desa, dan masyarakat dapat berembug

dalam satu agenda untuk memecahkan dan mendiskusikan program-program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat setempat. Pada musyawarah tersebut diharapkan tercipta kesepakatan yang bersifat demokratis dan saling menguntungkan satu-sam lain. Seperti peribahasa Makassar (Zainuddin, 1995) yang menyatakan :

“Mae maki naki assamaturu appa'sere tuju”

Terjemahnya :

Kesepakatan dalam musyawarah bahwa yang menjadi kesepakatan kita bersama.

Makna dalam peribahasa tersebut tersirat nilai demokrasi, keadilan serta kesetaraan hak dalam penyusunan alokasi dana desa. Seluruh komponen desa Cakura berhak mengajukan aspirasi dan berhak memberikan pendapat terkait alokasi dana desa yang disusun. Nilai tersebut membentuk kesatuan komponen desa yang kompak menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang efisien. Adapun pernyataan yang senada dengan istilah tersebut yaitu :

“Mae maki naki assamaturu appa'sere tuju, Artinya kesepakatan dalam musyawarah bahwa yang menjadi kesepakatan kita bersama, itulah paruntukkana yang sebenarnya. Hasil musyawarah dalam peraturan desa, itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Karena ada undang-undang yang kita buat bersama. Semacam peraturan desa, yang disepakati selaku paruntukkana di desa yang apabila dilanggar, akan kena imbas dan bisa kena hukum desa”. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura 02 Oktober 2017).

Makna *“Mae maki naki assamaturu appa'sere tuju”* memberikan gambaran bahwa dalam musyawarah akan diperoleh kesepakatan yang mengandung nilai demokrasi dengan pertimbangan keuntungan kedua belah pihak sehingga tujuan dan harapan masing-masing dapat terpenuhi.

Konteks nilai dalam unsur ini menghasilkan nilai demokrasi. Berada pada inti penyusunan alokasi dana desa, masyarakat bisa mengaplikasikan unsur *tauanrannuang* yang mengandung nilai pokok peramuan segala aspirasi sehingga, program yang diaspirasikan dimusyawarahkan dalam rapat dan ditimbang sesuai skala prioritas untuk menghasilkan nilai demokrasi seperti pernyataan berikut ini :

“Dalam pengambilan keputusan harus musyawarah mufakat yang disepakati oleh semua kalangan masyarakat dan aparat pemerintahan sehingga dalam menjalankan tugas masing-masing, kita berjalan sesuai dengan hasil musyawarah itu di dalamnya, mufakat. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat asli Desa Cakura berikut ini :

“Saran masyarkat harus dipertimbangkan dengan baik, sebab kami adalah orang yang sangat paham akan keadaan desa”. (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka pengamplikasian unsur *assamaturu* memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat karena masyarakat sangat memahami keadaan lingkungannya dan harus meperjuangkan hak-haknya. Terlihat pada hasil musyawarah dalam rapat Desa Cakura yang mengalokasikan ADD hanya pada lingkup operasional pemerintahan, dengan ketentuan bahwa Dana Desa difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan. Adanya musyawarah mufakat dalam penyusunan ADD tersebut maka nilai demokrasi yang diimplementasikan akan memberikan nilai positif sejalan dengan harapan masyarakat.

Pada konteks selanjutnya, **unsur *pappasang*** yang mengandung makna amanah, pesan, petuah yang dijadikan sebagai dorongan dan pegangan dalam

melakukan sesuatu. Unsur ini terletak pada tiga bagian penyusunan alokasi dana desa yaitu pra-penyusunan, penyusunan, dan pengambilan keputusan. Pada konteks pra-penyusunan alokasi dana desa, unsur *pappasang* ini dimasukkan ke dalam paham *kana tau toa* atau petuah. Pra-penyusunan diiringi *kana tau toa*, memberikan penekanan agar aparat berlaku sebagaimana mestinya. Seperti pernyataan masyarakat Desa Cakura yang menyatakan bahwa :

“Appilangneriki’ kana tau toa naki siruppa singarak. Itumi kenapa orang haruski bekerja sesuai sama apa yang dikasi taukangki’”. (Hasil wawancara Masyarakat Desa Cakura, 01 Oktober 2017).

Terjemahnya :

Dengarkan pesan orang terdahulu, agar kita menemui titik terang (keselamatan).

Tersirat makna bahwa dengan menganut pesan-pesan moral (petuah yang berisi tentang berperilaku baik) orang terdahulu maka kita akan menemukan keselamatan dengan menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap apa yang akan dikerjakan. Demikian dalam pra-penyusunan alokasi dana desa, mengemban pesan moral (perilaku baik) akan membawa pada tujuan hidup yang seyogianya. Kemudian dalam konteks penyusunan alokasi dan pengambilan keputusan, unsur *pappasang* dinyatakan ke dalam makna amanah. Oleh sebab itu, sastra lisan Makassar (kelong *pappasang*) oleh Baso (2017) dinyatakan istilah :

“Paragayyajintu saju, capaka mappasalasa tamatutua appabattu sassa lalang”

Terjemahnya :

Pemain raga pun bisa keliru, memandang enteng itu merusak, dan tidak berhati-hati akan mendatangkan kerusakan.

Makna dalam istilah di atas memberikan pesan agar sikap hati-hati dalam mengambil keputusan tetap terjaga, dan menghindari sikap memandang enteng sesuatu. Terkait penyusunan alokasi dana, amanah yang disampaikan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata sebab bisa jadi merupakan sebuah *boomerang* di depan mata. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan seorang *tau nirannuang* harus tetap hati-hati dan bijak.

Berarti pesan, petuah dan amanah, maka konteks islam dalam unsur ini lebih erat dan terikat dengan unsur *kacaraddekang*. Sehingga dalam penyusunan alokasi dana desa, unsur ini ditempatkan pada pramusyawaroh dimana aparat melakukan pertimbangan atas segala perbuatan dan tetap bersikap hati-hati dalam meramu aspirasi dan pengambilan keputusan. Hal tersebut didasari dengan sikap hati-hati untuk mengelola harapan masyarakat sesuai dengan pernyataan berikut:

“Nah, makanya saya sering berpesan kepada pak desa bahwa beliau harus berhati-hati dengan adanya dana desa ini. Sebab dana desa tersebut sebenarnya amanah yang bisa mencederai. Dana ini luar biasa dek, sedikit kita tergiur dan salah dalam mengelolanya maka hancurlah desa dan isinya”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cakura, 27 September 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, peran nilai *pappasang* sangat mempengaruhi mental aparat dalam melakukan pengelolaan ADD dan Dana Desa. *Pappasang*, amanah atau pesan tersebut melahirkan sikap aparat yang bertanggungjawab dalam segala aspek. Berhati-hati, menghindari sifat serakah dan bertanggungjawab atas harapan masyarakat, lingkungan, dan bertanggungjawab kepada Ilahi selaku pemberi amanah.

Terakhir, **unsur *kacaraddekang***. Unsur ini menjadi sebuah pengendali dari semua unsur yang ada dalam falsafah *panrannuangku*. Demikian unsur tersebut terdiri atas tiga bentuk kecerdasan yang mendasar yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam penyusunan alokasi dana desa, unsur kecerdasan intelektual terletak pada penyusunan anggaran alokasi dana yang akan memengaruhi keberlangsungan program pembangunan desa. Oleh karena itu, aparat harus memiliki pengetahuan yang lebih terkait penganggaran dana untuk membedakan masyarakat dengan meraka. Seperti dalam peribahasa Makassar oleh Zainuddin (1995) berikut:

“Kamma tamparang lantangngi panggappana”

Terjemahnya :

Seperti lautan, dalam penahamannya.

Makna istilah ini diperuntukkan pada aparat agar memiliki pemahaman yang dalam terhadap sesuatu yang sedang digeluti. Seperti harapan masyarakat kepada aparat lewat pernyataan berikut ini :

“Aparat pemerintah harus pintar dan cerdas, sebab itu yang akan membedakan masyarakat dengan aparat”. (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Cakura, 01 Oktober 2017).

Pernyataan tersebut senada dan mendapat dukungan dari pernyataan berikut :

“Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu karena dalam menjalankan tupoksi, dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya, ia mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan akan sulit menyerap tugas yang diberikan dibanding dengan yang memiliki pendidikan”. (Hasil wawancara Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual aparatur harus menjadi landasan dalam kinerjanya untuk menunjang hasil yang sesuai harapan dan tujuan lembaga. Selanjutnya unsur emosioal, unsur ini erat kaitannya dengan unsur *pappasang*. Lewat pemahaman petuah atau pesan moral maka akan terbentuk kecerdasan emosional dalam melakukan tugas pokok selaku aparat. Hal tersebut tidak jauh dari aspek kecerdasan spiritual yang dilandasi pemikiran akhir menuju pertanggungjawaban kepada Ilahi dengan demikian maka dapat menekan tindak kecurangan, baik itu dalam penganggaran maupun pelaksanaan program alokasi dana untuk pembangunan.

Berdasarkan pembahasan di atas berarti bahwa unsur-unsur pokok kearifan *Panrannuangku* memiliki nilai yang mengandung peranan penting dalam kinerja aparat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Pada penyusunan alokasi dana desa, unsur-unsur tersebut akan menyentuh harapan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa. Berikut unsur-unsur dan implikasinya terhadap harapan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa, spesifiknya penyusunan alokasi dana desa

Merupakan pengendali atas keseluruhan unsur, maka unsur *kacaraddekang* dalam penyusunan alokasi dana desa akan menghasilkan pengelolaan ADD dengan penganggaran sesuai skala prioritas kegiatan. Seperti yang terkandung dalam pernyataan berikut :

“*Kacara’dekang* dalam hal ini kepintaran, ini bisa muncul beberapa persepsi namun yang paling kompeten dalam pemerintahan adalah intelektualnya. Ini memang dibutuhkan dalam kepemimpinan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cakura, 28 September 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, sudut *kacaraddekang* intelektual memberikan pengelolaan dana yang seimbang sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pengelolaan ADD sebagaimana mestinya dengan kesesuaian dana yang akan digunakan dan program yang diprogramkan. Berlandaskan kecerdasan mengendalikan emosi dan spiritualnya untuk mengesampingkan tujuan pribadinya, hal tersebut sejalan dengan *stewardship teory* yang mengesampingkan tujuan pribadi demi tujuan organisasi dan tujuan pribadi tersebut akan diperoleh dengan berjalannya tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka kecerdasan sedemikian rupa dapat tergambar dalam pernyataan berikut :

“Maka dari itu implementasi ilmu, memanfaatkan ilmu ke jalan yang benar jangan di jalan yang sesat, yang menjobloskan dirinya ke dalam hal yang bersifat “kejahatan” dan mendapat manfaat yang sebenarnya menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan sampe ke tangan ke aparat yg berwenang karna menggunakan ilmu yang dimiliki tidak sesuai.” (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cakura, 02 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, unsur *kacarddekang* pada tiga aspek yaitu intelektual, emosional dan spriritual akan menghasilkan pengelolaan ADD yang membangun pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga Desa Cakura semakin berkembang dengan kebijakan ADD tersebut. Sehubungan dengan program yang dihasilkan dalam musyawarah Desa Cakura terkait ADD hanya sebatas pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka unsur ini bisa dijadikan pengendali bagi aparat agar melakukan perhitungan pengalokasian dana dengan semestinya, menghindari sifat serakah dengan melakukan pengalokasian, perhitungan dengan sebaik-baiknya ilmu yang dimiliki oleh aparat.

Keenam unsur ini memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga harus tertanam secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat dalam penyusunan Alokasi Dana Desa dan pembangunan. Meski hampir dan bahkan memiliki kesamaan akan sarat nilai yang terkandung, namun setiap unsur memberikan implikasi yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur falsafah tersebut memiliki peranan penting. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut harus diimplementasikan secara keseluruhan untuk hasil yang maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai Kearifan “*Panrannuangku*” di Desa Cakura Ditinjau dari *Expectancy Theory*

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi pada *Expectancy theory* yaitu kekuatan yang memotivasi seseorang bekerja giat tergantung hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Hal tersebut sesuai dengan makna falsafah *panrannuangku* yang dinyatakan oleh Kepala Desa Cakura bahwa peranan harapan yang timbal balik (*feedback*) di dalamnya mengarah pada kinerja yang baik untuk suatu tujuan.

Dapat digambarkan bahwa seorang aparat melakukan tugasnya dengan baik ketika ada harapan bahwa ia akan mendapat imbalan sesuai kinerja yang diberikan. Sedangkan hasil kinerja yang mereka lakukan dinyatakan berhasil ketika mampu memenuhi harapan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai tujuan dari organisasi. Jadi aparat akan memperoleh apa yang mereka harapkan, ketika berhasil memenuhi harapan masyarakat sebagai perantara menuju hasil kinerja mereka. Maka tercipta hubungan timbal balik diantara keduanya. Demikian nilai *panrannuangku* ditinjau dari *expectancy theory*.

2. Penempatan Unsur-unsur Pokok Kearifan “*Panrannuangku*” dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Cakura

Unsur-unsur falsafah *Panrannuangku* dalam penyusunan alokasi dana desa terletak pada tiga garis besar, yaitu pada pra-musyawarah, musyawarah (penyusunan) dan pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu: *Tau Nirannuang*, *Tau Anrannuang*, *Appakarannu-rannu*, *Assamaturu*, *Pappasang*, dan *Kacaraddekang*. Keenam unsur ini memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga harus tertanam secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat dalam penyusunan Alokasi Dana Desa dan pembangunan. Meski hampir dan bahkan memiliki kesamaan akan sarat nilai yang terkandung, namun setiap unsur memberikan implikasi yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur falsafah tersebut memiliki peranan penting. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut harus diimplementasikan secara keseluruhan untuk hasil yang maksimal.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti diantaranya berupa :

- a) Aparat pemerintahan dan seajarannya diharapkan benar-benar memahami tupoksi masing-masing.
- b) Meningkatkan kinerja aparat dengan memahami posisi mereka sebagai perantara demi kemakmuran masyarakat.

- c) Mendorong pihak pemerintah daerah mengimplementasikan nilai falsafah *panrannuangku* ke dalam semua lembaga pemerintahan Takalar untuk menuju Takalar bumi harapan yang sebenarnya.

C. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada demi perbaikan yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

- a) Kantor desa Cakura diharapkan membuat rincian anggaran dengan rincian yang paling rinci sebagai bentuk transparansi untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan.
- b) Kantor desa Cakura melampirkan visi dan misi lembaga agar pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga.
- c) Penelitian ini menggunakan *expectancy theory* landasan terhadap pengimplementasian falsafah *panrannuangku* dalam perilaku pelaku sektor publik dalam penyusunan dan penganggaran ADD/DD, maka diharapkan peneliti selanjutnya melakukan analisa falsafah terhadap pencatatan keuangan desa lebih rinci. Sehingga penerapan falsafah dikaji lebih luas dan menjadi sebuah pedoman.

Daftar Pustaka

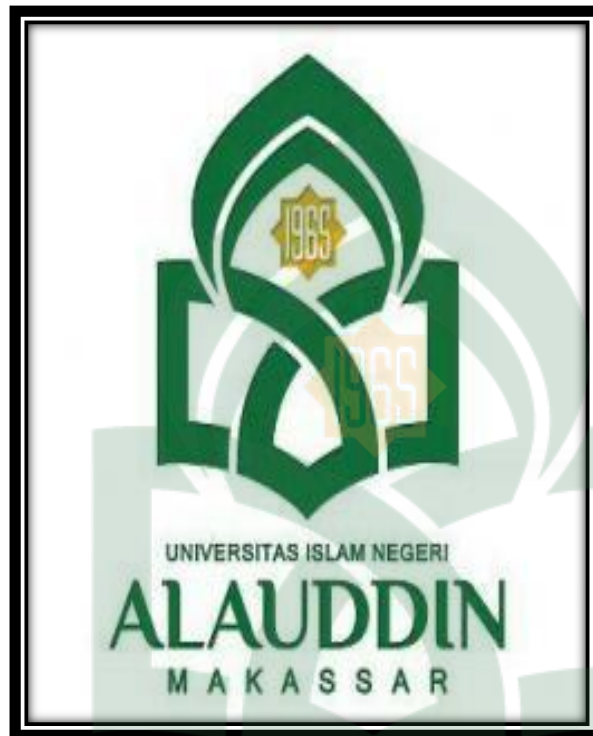
- Agustin, A., Sajamsiar S., dan Ratih N. P. 2014. Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Public (JAP)*. 2(4) : 735-739.
- Ainy, D. 2013. Expectancy Theory <http://daraainy.blogspot.co.id/2013/01/expectancy-theory.html>. (Diakses Selasa, 21 Februari 2017, 19:22:21 PM).
- Annivelorita. 2015. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. *E-Jurnal Administrasi Negara*. 3(5): 1712-1726.
- Ampa, A., R. 2014. Sekitar Sepuluh Kades yang Diduga Selewengkan Dana ADD di Kecamatan Marbo Kab. Takalar <http://www.mediakassus.com/2014/11/sekitar10-kades-yang-diduga-selewengkan.html>. (Diakses Rabu, 12 Juli 2017, 4:22:10 PM).
- Asni, F., dkk. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 village in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Bussiness and Management (IOSR-JBM)*. 10(4): 1-9.
- Baso, Y. S. 2017. Sastra Lisan Bahasa Makassar. <https://www.academia.edu>. (Diakses Rabu, 14 Juni 2017, 12:23:36 PM).
- Chomariyah, Nurul H, dan Bambang A. 2016. Participation Principle on The 2014 Village Law in Coastal Village. *International Journal of Bussiness, Economics and Law*. 10(4): 33-40.
- Darmiasih, N. K., Ni Luh G. E. S., dan Nyoman A. S. D. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Tribuana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 1(3): 1-12.
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 4(5): 1-20.
- Friskawini. 2012. Makna Siri' Na Pacce Di Masyarakat Bugis-Makassar. <https://imbasadi.wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini>. (Diakses Rabu, 14 Juni 2017, 12:07:39 PM).

- Hasyim, M. 2016. Nilai-Nilai Budaya dalam Kelong Makassar sebagai Suatu Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Bangsa. *Repository UNHAS*. 1-8.
- Huri, R. V., dan Djoko S. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*.
- Jahrir, A. S., Andi R. R dan Artha P. S. 2015. Pappasang (Makassar). <http://andisahtianij.blogspot.co.id/2015/08/pappasang-makassar-21.html>. (Diakses Selasa, 7 Maret 2017, 4:48:38 PM).
- Jailani, M. S. 2013. Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus). *Jurnal Edu-Bio*. 4 :41-50.
- Januraga, I. K dan I ketut, B. 2015. Pengaruh tehnik audit berbantuan komputer, kompetensi auditor, dan kecerdasan spiritual pada kualitas audit BPK Bali. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 13: 1137-1163.
- Kamaruddin, R. 2017. Baru Dilantik, Ketua Apdesi Takalar Minta ADD Naik 10% Ini Alasannya. <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/22/baru-dilantik>. (Diakses Senin, 30 Oktober 2017, 11:12:35 AM).
- Kila, K. K. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*. 5(1): 5188-5200.
- Koeswinarno. 2015. Memahami Etnografi Ala Spradley. *Jurnal SmarT*. 1(2): 257-265.
- Laonet, P., Suphawan V., dan Anurak P. 2013. Strategies for Capacity Building in Implementing the Village Fund. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 4(4): 131-136.
- Lunenburg, F. C. 2011. Expectancy theory of motivation: motivating by altering expectation. *International Journal of Management Bussiness, and Administration*. 15(1): 1-6.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi Dan Management*. 5(1): 10-22.

- Mustari, Z. R. 2012. Falsafah “*Panrannuangku*” Gagasan Tata Pemerintahan yang Baik : Refleksi Hari Jadi Takalar Yang Ke 50 <http://www.usmandjabbar.web.id/2012/05/falsafah-panrannuangku-gagasan-tata.html>. (Diakses Rabu, 8 Februari 2017 ,10:53: 00AM).
- Mongsawad, P. 2010. Filosofi dari Kecukupan Ekonomi: Sebuah Kontribusi Teori Pembangunan. *Journal Pembangunan Asia-Pasifik*. 7(1): 1-18.
- Nugraha, I. B. S. A dan I Wayan, R. 2015. Pengaruh Profesionalisme, ETIKA PROFESI, Dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-jurnal Akuntansi Uiversitas Udayana*. 13: 916-943.
- Prabawa. A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(1): 227-238.
- Peljan, D dan Metka T. 2008. The Impact Of Management Control System -Strategy Intercation On Performance Management : A Case Study. *Organizacija*. 41(5): 1-11.
- Putri, N. K., Sugih A. P., dan Aulia I. 2013. Penggunaan Expectancy Theory Dalam Upaya Mengukur Motivasi Kerja Karyawan di PDAM X. *e-Jurnal Teknik Industri FT USU*. 2(1): 32-36.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus ekonomi*. 2(1): 37-46.
- Rahman, F. 2011. Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*. 2(1): 13-24.
- Randa, F., Iwan T., Unti L., dan Eko G. S. 2011. Study Etnografi : Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terkulturasasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 2(1): 1-185.
- Randa, F dan Fransiskus E. D. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 5(3): 477-484.
- Roen, F. 2012. Teori dan Perilaku Organisasi <http://perilakuorganisasi.com/teori-harapan.html>. (Diakses Selasa, 21 Februari 2017, 06:27:02 AM).
- Ronaliyw. 2016. Lagi, Ada Kades Dituding Selewengkan Dana Desa <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/07/11/lagi-ada-kades-dituding-selewengkan-dana-desa/>. (Diakses Rabu, 12 Juli 2017, 4:25:26 PM).

- Rusdi, M. I. W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.
- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE)*. 6(1): 1-10.
- Simone. S. D. 2015. Expectancy Value Theory: Motivating Healthcare Workes. *American International Journal of Contemporary Research*. 5(2): 19-23.
- Sisoumang, B., Vute W., dan Visit L. 2013. Operation And Management of the Village Development Fund in Champasak Province, Lao PDR. *Kasetsart J. (Soc. Sci)* 34 : 335-349.
- Sulumin, H. H. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*. 3(1): 43-53.
- Venus, A. 2003. "Nonverbal Expectancy Violation Theory": Esensi dan Perkembangannya. *MediaTor*. 4(2): 301-306.
- Wida, S. A. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*.
- Yunianti, U. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*. 499-503.
- Zainuddin, H. 1995. Peribahasa Makassar. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN



✚ Daftar Pertanyaan Wawancara

✚ Hasil Wawancara

✚ Dokumentasi Penelitian

✚ Surat-Surat Penelitian

✚ Daftar Riwayat Hidup

Daftar Pertanyaan

Kepala Desa

1. Apa definisi alokasi dana desa menurut bapak?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif pengelolaan alokasi dana desa?
3. Metode seperti apa yang dilakukan oleh bapak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindakan piktif dalam masa jabatan bapak?
4. Bagaimana mekanisme penyusunan alokasi dana desa di Desa Cakura ini?
5. Bagaimana pengalokasian DD pada sektor sumber daya alam? Seperti apa implikasinya di dalam lingkungan desa?
6. Bagaimana pengalokasian DD pada sektor sumber daya manusia? Seperti apa implikasinya di dalam lingkungan desa?
7. Bagaimana aspirasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan alokasi dana desa?
8. Bagaimana peranan bapak menindaki aspirasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan ADD tersebut?
9. Apakah bapak mengetahui falsafah Daerah Takalar? Menurut bapak, apa makna yang terkandung dalam falsafah "*panrannuangku*"?
10. Bagaimana posisi falsafah *panrannuangku* dalam kinerja di kantor desa?
11. Apakah falsafah "*panrannuangku*" telah diterapkan dalam kinerja aparat-aparat di kantor desa ini?
12. Menurut bapak, unsur-unsur mana yang bisa memberikan peranan penting dalam kinerja aparat untuk keefisienan ADD?

13. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa (kana tau toa)* atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan selama melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah? Apa maknanya?



Daftar Pertanyaan

Sekretaris Desa

1. Apa definisi alokasi dana desa menurut ibu?
2. Bagaimana pandangan ibu terkait penyalahgunaan alokasi dana desa?
3. Metode apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa?
4. Apakah dalam penyusunan alokasi dana desa, masyarakat turut menyumbangkan suara dan berpartisipasi?
5. Apakah ibu pernah mengikuti salah satu program alokasi dana desa selaku sekretaris desa?
6. Apakah ibu mengetahui falsafah Daerah Takalar? Seperti apa makna yang terkandung didalamnya?
7. Apakah ibu mengetahui unsur-unsur falsafah “*panrannuangku*”?
8. Apakah falsafah “*panrannuangku*” telah diterapkan dalam kinerja aparat-aparat di kantor desa ini?
9. Bagaimana jika semua unsur falsafah tersebut diterapkan dalam kinerja aparat pemerintahan/desa bapak?
10. Menurut ibu, unsur-unsur mana saja yang mampu memberikan peranan penting dalam kinerja aparat untuk keefisienan ADD?

Daftar Pertanyaan

Ketua BPD

1. Apa yang anda ketahui tentang alokasi dana desa?
2. Pernahkah anda mengikuti salah satu program alokasi dana desa?
3. Apakah anda berpartisipasi dalam penyusunan alokasi dana desa?
4. Bagaimana anda mengaspisasikan harapan-harapan warga lain (yang tidak sempat ikut dalam musyawarah)?
5. Bagaimana tanggapan aparat pada aspirasi yang anda berikan?
6. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kantor Desa?
7. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?
8. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?
9. Sebagai masyarakat lokal, apakah anda mengetahui falsafah daerah Takalar? Menurut anda, apa makna yang terkandung dalam falsafah “*Panrannuangku*” tersebut?
10. Menurut anda, apakah aparat desa telah menerapkan nilai-nilai falsafah Takalar?
11. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa* (*kana tau toa*) atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan bagi mereka yang menjabat di pemerintahan? Apa maknanya?

Daftar Pertanyaan

Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang alokasi dana desa?
2. Pernahkah anda mengikuti salah satu program alokasi dana desa?
3. Apakah anda berpartisipasi dalam penyusunan alokasi dana desa?
4. Bagaimana anda mengaspirasikan harapan-harapan warga lain (yang tidak sempat ikut dalam musyawarah)?
5. Bagaimana tanggapan aparat pada aspirasi yang anda berikan?
6. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kantor Desa?
7. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?
8. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?
9. Sebagai masyarakat lokal, apakah anda mengetahui falsafah daerah Takalar? Menurut anda, apa makna yang terkandung dalam falsafah “*Panrannuangku*” tersebut?
10. Menurut anda, apakah aparat desa telah menerapkan nilai-nilai falsafah Takalar?
11. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa* (*kana tau toa*) atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan bagi mereka yang menjabat di pemerintahan? Apa maknanya?

Hasil Wawancara

Narasumber : Nurdiansyah S,Pd.

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal : 28 September 2017- 29 September 2017

Tempat : Dusun Bontomaka', Ling. Desa Cakura

1. Apa definisi alokasi dana desa menurut bapak?

: Dana desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan langsung ditransfer langsung ke dalam rekening desa. Penganggaran 10% untuk pendidikan (TK/TPA) dan 10% kesehatan karena itu dana desa diperuntukkan dalam infrastruktur, drainase, posyandu, sumur bor, dll.

Adapun penggunaan dana desa, Kepala desa dalam hal ini adalah penanggungjawab mutlak dan pengguna anggaran yang tidak bisa dipihak ketigakan sampai hari ini. Jadi kalau ada kepala desa yang pihak ketigakan kegiatan, yah siap-siap saja diperiksa.

2. Bagaimana pandangan bapak tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif pengelolaan alokasi dana desa

: Iyah, ada beberapa desa di indonesia yang bermasalah tentang penggunaan dana desa. Nah itu yang kurang bagus sebenarnya dan memang tidak bagus, karena merugikan. Untuk menghindari asumsi bahwa dana desa itu bisa diakali, penggunaan dana desa semua itu kami lakukan dengan transparans.

3. Metode seperti apa yang dilakukan oleh bapak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindakan piktif dalam masa jabatan bapak?

: Sekarang itu dana desa di program langsung, kita rapat pembangunan desa yg libatkan BPD, unsur pemerintah seperti kepala dusun, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, semua lini kami libatkan dalam RKPD. Jadi kami lebih mengutamakan transparansi, secara administrasi kami memasang baliho penggunaan rincian dana. Kemudian secara fisik kami membangun sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat dan alam sekitarnya.

4. Bagaimana mekanisme penyusunan alokasi dana desa di Desa Cakura ini?

: Mekanisme penyusunan alokasi dana desa itu, pertama-tama kami lakukan rapat kerja pembangunan desa (RKPD) dan menampung segala aspirasi masyarakat. Setelah itu diputuskanlah program-program yang bisa dikerjakan. Jadi kita itu sudah Rapat Kerja Pembangunan Desa sebelum dana itu turun, setelah dana turun maka kita putuskan kembali apa yang harus kita kerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Jadi RKPD bisa 10 program, tapi kita harus perhatikan dua hal yaitu skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia. Itu semua yang dibuatkan semua laporannya ke BPMD untuk dibuatkan RAB nya baru kita kerja, jadi selesai semua RABnya secara administrasi, dana cair baru kita kerjakan. Setelah itu barulah kegiatan disusun dan dana digunakan seproporsial mungkin.

5. Bagaimana pengalokasian DD pada sektor sumber daya alam? Seperti apa implikasinya di dalam lingkungan desa?

: Kami mengalokasikan dana desa pada sektor SDA sesuai dengan semestinya. Dana desa digunakan khusus untuk aset desa, sedangkan terkadang masyarakat mengeluh terkait jalanan yang mulai rusak (seperti di

depan rumah mereka) yang jelas-jelas merupakan aset daerah yang sebenarnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Talud di Dusun Cakura, pemadatan jalan tani Dusun (Buakanga, Je'nelimbua', Pangkaje'ne, dan Bontomaka'), Plat decker Dusun Je'nelimbua', pemadatan jalan perkampungan Dusun Bontocamba, pemadatan jalan pekuburan Dusun je'nelimbua', pembangunan gedung BPD, pembangunan MCK dan balai pelatihan.

6. Bagaimana pengalokasian DD pada sektor sumber daya manusia? Seperti apa implikasinya di dalam lingkungan desa?

: Pelatihan tehnis,

: Pelatihan untuk penlingkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

: Bimtek siskeucles

: Bimtek kader teknis

Jadi minimal itu di sektor pendidikan dianggarkan 10% dan kesehatan juga minimal 10%. Anggaran untuk pendidikan itu yang bisa dibiayai itu hanya tingkat TK-TPA misalnya perbaikan taman bermainnya, karena tingkat SD sudah tidak bisa dibiayai oleh desa lagi.

7. Bagaimana aspirasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan alokasi dana desa?

: Dalam rapat RKPD semua berhak dan sama semua haknya untuk mengusulkan program yang mau dilaksanakan di dusun masing-masing, nanti diputuskan oleh forum rapat itu yang kemudian disetujui oleh kepala desa dan BPD. Masyarakat di desa ini sendiri sangat berpartisipasi dalam

setiap rapat, karenanya tugas kami aparat pemerintah untuk merampung semuanya menuju pembangunan desa.

8. Bagaimana peranan bapak menindaki aspirasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan ADD tersebut?

: Saya selaku kepala desa yang diberikan amanah, selalu terbuka kepada masyarakat dan menerima setiap keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturannya termasuk ketika mereka mengaspirasikan idenya dalam penyusunan alokasi dana desa.

9. Apakah bapak mengetahui falsafah Daerah Takalar? Menurut bapak, apa makna yang terkandung dalam falsafah "*panrannuangku*"?

: *Panrannuangku* itu kan asal katanya harapkan, jadi kalau bupati bilang *Panrannuangku* kepada masyarakat takalar, berarti harapkan terhadap masyarakat Takalar. Sehingga inilah barangkali mendasari kita secara umum dalam melaksanakan pemerintahan atau kegiatan apapun kita selalu melibatkan masyarakat. jadi ada feedbacknya antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi pemerintah menaruh harapannya kepada masyarakat sementara masyarakat juga menaruh harapannya kepada pemerintahnya. Jadi ada hubungan timbal balik di sini.

Nah itu yang selama ini keluarga dan masyarakat awam tidak banyak yang tahu! Sehingga mereka beranggapan bahwa pemerintah kerjanya seperti ini, ini dan ini, tidak ada kepentingan saya sekalipun si A B C D yang jadi pemerintah. Padahal masyarakat membutuhkan pemerintah karena ia yang bisa mensejahterahkan masyarakatnya, kalau pemerintahnya tidak pro-

rakyat maka jangan harap masyarakatnya sejahtera. Jadi keduanya memiliki keterlibatan dan keterikatan satu sama lain.

10. Bagaimana posisi falsafah *panrannuangku* dalam kinerja di kantor desa?

▪ *Tau nirannuang*

: Kepala desa itu adalah orang yang *dirannuang* di desanya, sehingga *panrannuang* itu adalah merupakan satu amanah jangan dikhianati *panrannuang* rakyat. Mau tidak mau, terima tidak terima, saya adalah orang yang *dirannuang* masyarakat cakura untuk mengurus masyarakat cakura *eroki teai, pasti nakke nirannuang amperhatikangi cakura* selama masa kepemimpinan saya. Jadi jangan khianati itu *panrannuang*.

Pemerintah itu siapapun dia, harus berkata jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatannya "*Punna le'leng, le'leng tommo*"(kalau hitam, dimana pun itu tetap hitam), itu yang harus kita lakukan. Jangan berubah karena sesuatu, sebab kepercayaan seseorang tidak bisa diukur karena terkadang "*tawwa sikalia tappa*" (orang hanya sekali percaya) oleh sebab itu kepercayaan diemban dengan baik. Nah itu kepala desa yang tidak bisa *dirannuang*, karena mengkhianati *panrannuang* rakyat. Kepala desa itu bukan *panrannuangna* si A si B, tapi *panrannuangna tau jaia*. Karena kita ini ada aturan negara yang mengatur.

▪ *Tau anrannuang*

: Nah, itu tadi. Kita berikan ruang untuk mengaspirasikan pendapatnya, kita rampung, dan kita tetapkan mana yang jadi prioritas bersama sehingga tidak ada jeda antara kepala desa dan masyarakat. Berlaku jujur dan amanah kepada masyarakat.

▪ *Appakarannu-rannu*

: Nah itu dia. Untuk kepentingan politik banyak orang yang melakukan seperti itu, tapi kalau kita mau konsisten, dan pemimpin yang sejati apapun kata mereka kebenaran harus ditegakkan. Saya selalu katakan : apapun resikonya!! karena pemimpin itu harus siap menanggung resiko *punna tau lammiri' anrai' anginga anrai' tongi, ammiri' kalau' anginga kalu' tongi*, itu tidak bisa *matei ra'yaka* (kalau orang yang ikut arah mata angin, jika angin berhembus ke Timur ia ikut ke timur, jika angin berhembus ke barat ia ikut ke barat itu tidak bisa, rakyat bisa mati ditangannya).

▪ *Assamaturu'*

: Disinilah kerja keras saya selaku pemimpin karena *assamaturu* itu bukanlah satu pekerjaan yang ringan karena *assmaturu* itu melibatkan sekian banyak orang, yang harus disamakan persepsinya untuk satu tujuan. Cakura ini 2724 jumlah penduduk yang berani saya katakan sampe saat ini tidak satupun diantara mereka yang sama mau dan pemikirannya. Untuk menyamakan itu, kita harus kerja keras supaya bisa *assamaturu*.

▪ *Pappasang*

: Pemerintah itu harus satu kata dengan perbuatan *teai tawwa sike'de'-ke'de a'lancilanci* (janganlah kita sedikit-sedikit melompat atau tidak konsisten). Harus punya pegangan dan ketegasan dan ketegasan ini harus ada keberanian dan siap dengan resiko. *Punna erokko larro larro tonjako mange haknu, yang penting anne demi kebenaran tiai kapantinganku*

(jika engkau mau marah, silahkan sebab itu adalah hakmu, yang penting **ini** demi kebenaran bukan kepentingan pribadi)

(***ini**; apa yang dilakukan pak desa.)

▪ *Kacara'dekang*

: *Kacara'dekang* dalam hal ini kepintaran, ini bisa muncul beberapa persepsi namun yang paling kompeten dalam pemerintahan adalah intelektualnya. Ini memang dibutuhkan dalam kepemimpinan.

11. Apakah falsafah "*panranuangku*" telah diterapkan dalam kinerja aparat-aparat di kantor desa ini?

: Secara pribadi saya itu berbuat dan bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu jadi sekalipun saya tidak di kantor desa, tapi saya bekerja untuk desa untuk masyarakat. Beberapa aparat memang *stay* di kantor untuk memberikan pelayanan tetapi saya sendiri tidak dibatasi waktu dan tempat untuk bekerja sebagai kepala desa.

12. Menurut bapak, unsur-unsur mana yang bisa memberikan peranan penting dalam kinerja aparat untuk keefisienan ADD?

: Pertama adalah intelektual, yang kedua adalah agamanya, tidak bisa tidak yang itu antara intelektual dan agama, harus seimbang karena kecerdasan spiritual dan intelektual untuk bisa mengkoordinir segala perbuatan kita.

13. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa (kana tau toa)* atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan selama melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah? Apa maknanya?

- : *“Ribangngia lagi na tatassela’ matangku apalagi ri alloa ampikkiri katallassangna tau jaia”*. (Semalam saja matakun tidak bisa terlelap, apalagi disianghari memikirkan kehidupan orang banyak).
- : *“akkulle nijama anne alloa nijama memangmi, ammuko maraeng tongi seng”*. (jika bisa selesai hari ini, jangan ditunda besok, sebab besok lain lagi).



Hasil Wawancara

Narasumber	: Hasriani, SE
Jabatan	: Sekretaris Desa
Tanggal	: 27 September 2017
Tempat	: Kantor Desa Cakura

1. Apa definisi alokasi dana desa menurut ibu?
: Alokasi dana desa itu merupakan dana dari pusat yang diperuntukkan ke dalam seluruh program pembangunan desa dari hasil musyawarah dengan masyarakat. Dana Desa itu dek seperti Bisa Ular, kalo bisa diolah dengan baik akan jadi obatki. Tetapi kalo misalkan tidak diolah dengan baikki, akan jadi racunki.
2. Bagaimana pandangan ibu terkait penyalahgunaan alokasi dana desa?
: Sebenarnya hal seperti itu sudah sangat jelas salah, karena kalau dilihat dari aturannya dalam undang-undang desa hal seperti itu termasuk tindak pidana. Dari keseharian saja kita sudah tahu bahwa yang seperti itu sudah jelas salah, lebih-lebih diikuti dengan aturan yang ada.
Nah, makanya saya sering berpesan kepada pak desa bahwa beliau harus berhati-hati dengan adanya dana desa ini. Sebab dana desa tersebut sebenarnya amanah yang bisa mencederai. Dana ini luar biasa dek, sedikit kita tergiur dan salah dalam mengelolanya maka hancurlah desa dan isinya.
3. Metode apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa?

: Peringatan akan sanksi penangguhan dana berikutnya. Dana untuk desa diberhentikan dan tidak dicairkan, sehingga aparat enggan dan takut untuk berlaku curang karena akan berdampak kepada keseluruhan aparat.

4. Apakah dalam penyusunan alokasi dana desa, masyarakat turut menyumbangkan suara dan berpartisipasi?

: Nah justru partisipasi masyarakat disinilah yang memiliki peranan penting dalam Alokasi Dana Desa, sekitar 40 orang masyarakat datang dan memberikan aspirasi pada setiap pertemuan. Beberapa aspirasi masyarakat ditampung dan yang dianggap sejalan dengan tujuan pemerintah akan dijalankan.

5. Apakah ibu pernah mengikuti salah satu program alokasi dana desa selaku sekretaris desa?

: Pernah, saya diikutkan pelatihan untuk Alokasi Dana Desa.

6. Apakah ibu mengetahui falsafah Daerah Takalar? Seperti apa makna yang terkandung didalamnya?

: Takalar itu *Panrannuangku, Butta Panrannuangku* : tanah harapan, terdepan dalam pelayanan. Sehingga sebagai orang yang bertanah kelahiran di sini, jelas menanamkan harapannya tinggi-tinggi untuk mendapatkan kemakmuran. Dalam pemerintahan, kami memberikan pelayanan secara terdepan agar harapan masyarakat terpenuhi demi tercapainya Takalar yang terdepan.

7. Apakah ibu mengetahui unsur-unsur falsafah "*panrannuangku*"?

: *Appakarannu-rannu*, itu merupakan salah satu bagian dari *panrannuangku* yang memiliki tujuan menyenangkan hati, untuk menghibur dengan memberikan sesuatu yang memang diharapkan oleh orang lain.

: *kacara'dekang*, bagaimana pintar-pintarnya aparat mengelola semua aspirasi yang masuk sehingga memberikan kesan yang baik.

: *tanggungjawab/amanah*, ini yang paling penting karena pertanggungjawabannya sampai ke akhirat.

8. Apakah falsafah "*panrannuangku*" telah diterapkan dalam kinerja aparat-aparat di kantor desa ini?

: saya rasa beberapa unsurnya telah diterapkan, seperti yang saya sebutkan tadi, unsur *assamaturu* diterapkan dalam musyawarah-musyawarah desa dengan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan mengelolanya sebaik mungkin. Kemudian *Kacaraddekang*, nah itu tadi kami melakukan berbagai strategi agar supaya aspirasi masyarakat sejalan dengan pokok pemikiran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kita sama-sama untung. Yang terakhir yaitu *amanah*, di Takalar khususnya bersemboyankan falsafah yang terdiri atas unsur *amanah* yang harus dijalankan apalagi *Takalar butta panrannuangku* merupakan *pappasang tau mariolo*, itu satu kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan menuju Takalar bumi harapan.

9. Bagaimana jika semua unsur falsafah tersebut diterapkan dalam kinerja aparat pemerintahan/desa bapak?

: menurut saya akan lebih baik lagi ketika seluruh unsur falsafah benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah juga di luar lingkup desa, karena otomatis akan memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah Takalar.

10. Menurut ibu, unsur-unsur mana saja yang mampu memberikan peranan penting dalam kinerja aparat untuk keefisienan ADD?

: menurut saya sih yang dominan bisa dijadikan pedoman adalah *appakarannu-rannu* karena unsur ini bisa dibilang telah merangkum dua unsur yang saya sebutkan tadi dan tiga unsur yang adek sebutkan juga. Jadi ketika aparat memahami konteks *appakarannu-rannu* yang sebenarnya, maka itu luar biasa implikasinya, sebab akan memberikan pencerahan bagi kinerja.



Hasil Wawancara

Narasumber : Ismail Dg. Mone

Jabatan : Ketua BPD Desa Cakura

Tanggal : 02 Oktober 2017

Tempat : Dusun Bontocamba, Desa Cakura

1. Apa yang anda ketahui tentang alokasi dana desa?

: Alokasi dana desa itu merupakan salah satu program anggaran pemerintah untuk membangun pedesaan. Alokasi dana desa lebih banyak mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan untuk pembangunan dan selebihnya itu berada pada lingkup Dana Desa.

2. Pernahkah anda mengikuti salah satu program alokasi dana desa?

: Pernah, salah satunya seperti bimbingan teknis aparatur desa. bukan hanya staff desa saja, tetapi orang-orang dalam BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama pun ikut serta dalam bimbingan teknis aparatur pemerintahan desa.

3. Apakah anda berpartisipasi dalam penyusunan alokasi dana desa?

: Iyah, saya berpartisipasi dalam musyawarah dan RKPD. Akan tetapi untuk masalah penyusunan anggaran, dalam musyawarah kami membentuk Tim Penyusun Anggaran untuk menyusun penganggaran program yang telah dirapatkan. Ada memang tim penyusun di desa yang kita musyawarahkan yang masuk tim penyusun ini dan ini. A tim 9 namanya.

4. Bagaimana anda mengaspirasikan harapan-harapan warga lain (yang tidak sempat ikut dalam musyawarah)?

: Dalam rapat, saya selaku kepala BPD merampung segala harapan masyarakat sekitar dan menuangkannya dalam rapat maupun musyawarah. Misalnya, usulan tentang adanya pembentukan jalan tani, diadakannya MCK, pembentukan jalan kuburan, dan Talud pada jalan, jalan kampung untuk penduduk, semua itu merupakan rampungan dari semua keluhan dan harapan masyarakat sekitar kepada kami.

5. Bagaimana tanggapan aparat pada aspirasi yang anda berikan?

: Alhamdulillah, berdasarkan hasil musyawarah kami menetapkan bahwa ADD diperuntukkan ke dalam 3 program yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor, kegiatan operasional kelembagaan desa. dan untuk pemberdayaan sendiri dialihkan ke DD (dana desa). Dalam musyawarah tersebut, aparat desa menanggapi dengan baik dan kami merapatkan program-program tersebut hingga beberapa diantaranya dijadikan sebagai program pembangunan dan saat ini telah direalisasikan program pembangunan tahap pertama sebesar 70%, dan sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Bisa dibilang 50% telah real secara fisik.

6. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kantor Desa?

: Bagus, Alhamdulillah bagus.

7. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?

: Pembentukan jalan tani, diadakannya MCK, pembentukan jalan kuburan, Talud pada jalan, jalan kampung untuk penduduk.

8. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?

: Bimbingan teknis aparatur pemerintahan

9. Sebagai masyarakat lokal, apakah anda mengetahui falsafah daerah Takalar? Menurut anda, apa makna yang terkandung dalam falsafah "*Panrannuangku*" tersebut?

: *Panrannuangku*, semboyan atau falsafah itu lebih mengarah kepada kepercayaan (orang diperya) dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Semboyan ini mengarah kepada orang yang dipercaya memimpin takalar, mengarahkan masyarakat kepada "*kabajikang*".

10. Menurut anda, apakah aparat desa telah menerapkan nilai-nilai falsafah Takalar?

○ *Tau nirannuang*

: Sosok tau nirannuang bukan Cuma kepala desa, aparat pun termasuk. Namun di luar kepa desa, mereka belum bisa diharapkan secara utuh masih perlu adanya pembinaan di desa, terutama para aparat-aparat desa dan perangkat desa.

○ *Tau anrannuang*

: Harapan masyarakat itu yang pertama, dalam pelayan masyarakat itu aparat desa harus tepat guna dan lebih bagus di masyarakat. Kedua, pada dasarnya aparat pemerintah paham akan hak dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

○ *Appakarannu-rannu*

: Agar pemerintah dan aparat pemerintah desa tidak sekedar menyenangkan hati dengan menjanjikan kesejahteraan kepada

masyarakat, maka perlu bimbingan teknis (Bimtek). Supaya pemahaman akan pelayanan kepada masyarakat itu bisa terlaksana bagus, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki seorang aparat sehingga dalam melayani masyarakat tidak seenaknya, karena tahu akan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan adanya bimbingan teknis itu.

- *Assamaturu'*

- : Dalam pengambilan keputusan harus musyawarah mufakat yang disepakati oleh semua kalangan masyarakat dan aparat pemerintahan sehingga dalam menjalankan tugas masing-masing, kita berjalan sesuai dengan hasil musyawarah itu di dalamnya, mufakat.

- *Pappasang*

- : Dalam menjalankan tugasnya, jangan pilih kasih dalam pelayanan masyarakat pada karena masyarakat pada umumnya kedudukan dan haknya sama di muka umum, tidak boleh ada yang kita inrefensi dalam melayani masyarakat.

- Harus menjalankan fungsi dan tugasnya (tupoksi) sesuai dengan petunjuk masing-masing.

- *Kacara'dekang*

- : Ilmu pengetahuan,

- Pentingnya memiliki ilmu pengetahuan; Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu karena dalam menjalankan tupoksi, dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya, ia mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Orang yang tidak memiliki

pengetahuan akan sulit menyerap tugas yang diberikan dibanding dengan yang memiliki pendidikan.

Maka dari itu implementasi ilmu, memanfaatkan ilmu ke jalan yang benar jangan di jalan yang sesat, yang menjobloskan dirinya ke dalam hal yang bersifat “kejahatan” dan mendapat manfaat yang sebenarnya menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan sampe ke tangan ke aparat yg berwenang karna menggunakan ilmu yang dimiliki tidak sesuai.

11. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa (kana tau toa)* atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan bagi mereka yang menjabat di pemerintahan? Apa maknanya?

: “*Mae maki naki assamaturu appa'sere tuju,*

Artinya kesepakatan dalam musyawarah bahwa yang menjadi kesepakatan kita bersama, itulah *paruntukkana* yang sebenarnya. Hasil musyawarah dalam peraturan desa, itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Karena ada undang-undang yang kita buat bersama. Semacam peraturan desa, yang disepakati selaku *paruntukkana* di desa yang apabila dilanggar, akan kena imbas dan bisa kena hukum desa.

Hasil Wawancara

Narasumber : Dg. layu

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 01 Oktober 2017

Tempat : Dusun Bontocamba, Desa Cakura

1. Apa yang anda ketahui tentang alokasi dana desa?
: Alokasi dana desa itu merupakan dana dari bupati untuk pembangunan, untuk membuat talud dan sarana-prasarana desa.
2. Pernahkah anda mengikuti salah satu program alokasi dana desa?
: Tidak, karena sibuk terus, tidak pernah ada waktu yang pas bertepatan dengan hari rapatnya. Pasti sibuk di sawah dan mengurus rumah dan anak.
3. Apakah anda berpartisipasi dalam penyusunan alokasi dana desa?
: Saya tidak pernah ikut, yah paling suara (aspirasi) saya disampaikan oleh suami jika ikut atau lewat ketua BPD sewaktu-waktu ketika bertemu sebelum rapat diadakan.
4. Bagaimana anda mengaspisasikan harapan-harapan warga lain (yang tidak sempat ikut dalam musyawarah)?
: -
5. Bagaimana tanggapan aparat pada aspirasi yang anda berikan?
: Alhamdulillah, tanggapannya baik karena mereka (aparat) orang di sini juga jadi komunikasi dan tanggapannya terhadap aspirasi hampir sejalan dengan mereka.

I nai lampakabajiki pa'rasanganga punna tiai para-para ikatte, punna tiai iya ngaseng anjo mae (aparat).

6. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kantor Desa?

: Bagus, Alhamdulillah bagus.

7. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?

: Pembentukan jalan tani, pembentukan jalan kuburan, Talud pada jalan, jalan kampung untuk penduduk.

8. Secara fisik, adakah yang anda ketahui tentang implikasi Alokasi dana desa pada sektor sumber daya manusia?

: Pelatihan untuk tokoh masyarakat dan aparat desa

9. Sebagai masyarakat lokal, apakah anda mengetahui falsafah daerah Takalar? Menurut anda, apa makna yang terkandung dalam falsafah "*Panrannuangku*" tersebut?

: *Panrannuangku*, itu harapan. Nia' anu ilalang riatinta, sesuatu anu nikaeroki.

10. Menurut anda, apakah aparat desa telah menerapkan nilai-nilai falsafah Takalar?

- *Tau nirannuang*

: Sebagian dari mereka, karena beberapa diantaranya msih butuh pelatihan.

- *Tau anrannuang*

: Harapan masyarakat itu asalkan desa semakin baik, aman, dan kami makmur.

- *Appakarannu-rannu*

: Pemerintah harus memperhatikan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat, jangan mengiyakan lantas hanya dimulut. *Caritaji accampuru' attu'*.

○ *Assamaturu'*

: Saran masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik, sebab kami adalah orang yang sangat paham akan keadaan desa.

○ *Pappasang*

: *Appilangngeriki' kana tau toa naki siruppa singarak*. Ituni kenapa orang haruski bekerja sesuai sama apa yang *dikasi taukangki'*.

○ *Kacara'dekang*

: Aparat pemerintah harus pintar dan cerdas, sebab itu yang akan membedakan masyarakat dengan aparat.

11. Sebagai masyarakat asli Takalar, adakah perumpamaan, kata-kata bijak, *pappasang tau toa (kana tau toa)* atau semacam *paruntukkana* yang anda ketahui bisa dijadikan pegangan bagi mereka yang menjabat di pemerintahan? Apa maknanya?

: *Ballei pa'risi'na masyarakaka na ammukomembara' natongkokangko siri'nu ri ampe-ampeanna.*

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Desa Cakura (Dok: 02 Oktober 2017)



Kepala Desa Cakura (Dok: 02 Oktober 2017)



Pembangunan fisik Dana Desa (Dok: 27 September 2017)



Pembangunan Fisik Dana Desa (Dok: 02 Oktober 2017)



Dokumentasi Rapat Palili Desa Cakura



Dokumentasi Rapat Palili Desa Cakura



Wawancara Kepala Desa Cakura (Dok: 28 September 2017)



Wawancara Ketua BPD Cakura (Dok: 02 Oktober 2017)

RIWAYAT HIDUP



Rafita, lahir di Takalar pada tanggal 12 Juni 1995. Anak pertama dari dua (2) orang bersaudara. Lahir dari pasangan Safri Dg. Sajang dan Karannuang Dg. Rannu. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDI Makammu. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Takalar.

Selesai dalam waktu tiga tahun, penulis kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMAN 3 MODEL Takalar dan selesai tahun 2013. Berlanjut, penulis mengikuti salah satu tes Perguruan Tinggi Negeri melalui seleksi SBMPTN di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kemudian penulis lulus dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis awalnya berdomisili di Asrama PIBA Kampus UIN selama setahun penuh, tahun berikutnya penulis pindah ke Asrama Rusunawa UIN selama 2 tahun dan terakhir, berdomisili di Pondok Annisa Jln. Mustafa Bunga VI (Jln. Beroanging). Penulis dapat dihubungi melalui:

No. Hp : 085242093399

Gmail : Rafita.dera@gmail.com

Adapun pengalaman organisasi penulis selama menempuh pendidikan :

1. Tingkat SD : Organisasi kepramukaan
2. Tingkat SMP : OSIS, PMR, dan Pramuka
3. Tingkat SMA : OSIS, PMR, Pramuka, Sanggar Seni
4. Tingkat Universitas : UKM SENI BUDAYA eSA, English Youth Community (E-You C) dan Ekonomi Connection (E-con)

Nomor : 4905/EB.I/PP.00.9/2017

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 29 Agustus 2017

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Sulawesi Selatan**

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Rafita
NIM	: 10800113076
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Beroanging, Mustafa Dg. Bunga VI

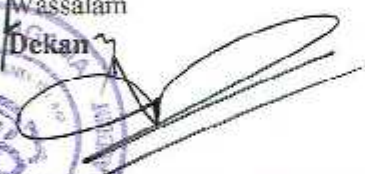
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya “ Implementasi Nilai "Panrannuangku" dalam Penyusunan Alokasi Dana Desa ditinjau dari Expectancy Theory (Studi pada Kantor Desa Cakura, Kab. Takalar)”

Dengan Dosen pembimbing: 1. Jamaluddin M, SE., M.Si.

2. Dr. Syaharuddin, M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Desa Cakura, Kabupaten Takalar.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13196/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4905/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RAFITA**
Nomor Pokok : 10800113076
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" IMPLEMENTASI NILAI PANRANNUANGKU DALAM PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI EXPECTANCY THEORY (STUDI PADA KANTOR DESA CAKURA KAB. TAKALAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 September s/d 04 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Portinggal*.





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 08 September 2017

Nomor : 070/552/KKBP-IX/2017
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Cakura Kec. Pol-Sel
Kab. Takalar
di-
Tempat

Menindak Lanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar Nomor : 13196/S.01P/P2T/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Perihal Izin Penelitian dengan ini disampaikan bahwa:

N a m a : **RAFITA**
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 12 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Alamat : Lingk. Makammu Kelurahan Bulukunyi
Kab. Takalar

Bermaksud akan melakukan Penelitian dan Permintaan data di Kantor/Instansi/ wilayah Saudara Pimpin dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul

"IMPLEMENTASI NILAI PANRANNUANGKU DALAM PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI EXPECTANCY THEORY (Study Pada Kantor Desa Cakura Kab. Takalar)

Yang akan dilaksanakan Selama : 04 September s/d 04 Oktober 2017
Pengikut / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan Yang dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar Foto Copy *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar;
5. Surat pemberitahuan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR
Kasubag. Tata Usaha

SYAMSUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pelata

Nip. 19691231 199401 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
- Up Ka. Badan Kesbang Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota Forkopinda Kab. Takalar di Takalar;
4. Kepala Bappelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Camat Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar di Takalar;
6. Dekan Fak Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin di Makassar;
7. Sdr.(i) **RAFITA** di tempat ;
8. Peringgal...

RIWAYAT HIDUP



Rafita, lahir di Takalar pada tanggal 12 Juni 1995. Anak pertama dari dua (2) orang bersaudara. Lahir dari pasangan Safri Dg. Sajang dan Karannuang Dg. Rannu. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDI Makammu, Desa Bulukkunyi. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Takalar.

Selesai dalam waktu tiga tahun, penulis kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMAN 3 MODEL Takalar dan selesai tahun 2013. Berlanjut, penulis mengikuti salah satu tes Perguruan Tinggi Negeri melalui seleksi SBMPTN di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kemudian penulis lulus dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis awalnya berdomisili di Asrama PIBA Kampus UIN selama setahun penuh, tahun berikutnya penulis pindah ke Asrama Rusunawa UIN selama 2 tahun dan terakhir, berdomisili di Pondok Annisa Jln. Mustafa Bunga VI (Jln. Beroanging). Penulis dapat dihubungi melalui:

No. Hp : 085242093399

Gmail : Rafita.dera12@gmail.com

Adapun pengalaman organisasi penulis selama menempuh pendidikan :

1. Tingkat SD : Organisasi kepramukaan
2. Tingkat SMP : OSIS, PMR, dan Pramuka
3. Tingkat SMA : OSIS, PMR, Pramuka, Sanggar Seni
4. Tingkat Universitas : UKM SENI BUDAYA eSA, English Youth Community (E-You C) dan Economi Connection (E-Con)